

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, UPAH
MINIMUM, INVESTASI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2016-2022**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Diva Rahmadha

Nomor Mahasiswa : 19313277

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2024**

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, UPAH
MINIMUM, INVESTASI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2016-2022**

SKRIPSI

Disusun guna diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Diva Rahmadha

Nomor Mahasiswa : 19313277

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiarisme seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang ditentukan dan berlaku.

Yogyakarta, 14 Januari 2024

Penulis,



Diva Rahmadha

PENGESAHAN

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2022.

Nama : Diva Rahmadha
Nomor Mahasiswa : 19313277
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 14 Januari 2024
Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Aminudin Anwar S.E., M.Sc.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW semoga kelak mendapat syafaatnya di Yaummul Qiyamah nanti. Tersusunya skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan program studi Sarjana Strata satu (S1) di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Hadirnya skripsi ini penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena penulis mengucapkan terimakasih atas segala kritik dan saran yang masuk serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Atas terselesaikannya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia;
2. Yth. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. selaku Kepala Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia;
3. Yth. Bapak Dr. Sahabuddin Sidiq, S.E., MA. selaku Kepala Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia
4. Yth. Bapak Aminudin Anwar S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang di tengah kesibukannya dengan sabar dan penuh perhatian membimbing serta memberikan dukungan moril hingga skripsi ini selesai;
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang telah memberikan ilmunya kepada kami;

6. Orang Tua tercinta Bapak Edy Purwanto dan Alm. Ibu Susi Harnani atas kerja keras, doa dan dukungan yang telah diberikan yang tak mungkin terbalaskan, terima kasih Bapak dan Alm. Ibu;
7. Kakak Dianita Aulia, Khoiruz Zaidi Taqwa, Dianissa Aulia, Sehabuddin Ardiansyah yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Muhammad Alfain Noor yang telah membantu dan menyemangati hingga skripsi ini selesai;
9. Teman-teman yang selalu menyemangati dan telah hadir serta saling berbagi cerita dan pengalaman selama mengampu di bangku perkuliahan;
10. Seluruh rekan-rekan IE 2019, dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Kalian adalah teman-teman terbaik, bersama kalian penulis dapat menemukan makna dalam persahabatan dan solidaritas untuk sukses bagi kalian semua;
11. Kepada diri sendiri Diva Rahmadha. Terima kasih sudah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah sampai titik ini. Tetap semangat dan bersyukur.

Akhir kata, kita hanya mengembalikan segala sesuatu kepada Allah SWT, tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan bagaimana penulis mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih karena dikelilingi oleh orang-orang baik. Penulis berharap semua pihak bisa mendapatkan balasan dari Allah SWT atas bantuan dan amal kebajikan kepada penulis. Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 14 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, UPAH MINIMUM, INVESTASI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016-2022	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	x
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
2.1 Kajian Pustaka	10
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Pasar Tenaga Kerja	13
2.3 Kerangka Pemikiran	22
BAB III	24
3.1 Jenis dan Sumber Data	24
3.2 Definisi Operasional Variabel	24
3.3 Metode Analisis	26
3.4 Metode Regresi Data Panel	26
3.5 Metode Estimasi	26
3.6 Menentukan Model Estimasi Regresi Data Panel	28
3.7 Uji Statistik	29
BAB IV	32
4.1 Deskripsi Data Penelitian	32

4.2	Hasil Analisis dan Pembahasan.....	34
4.3	Estimasi Model Fixed Effect.....	36
4.4	Koefisien Determinasi (R²)	37
4.5	Uji Simultan (Uji F)	38
4.6	Uji Individual (Uji T)	38
4.7	Pembahasan	40
4.8	Cross-Section Effect.....	43
BAB V.....		45
5.1	Simpulan.....	45
5.2	Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA		47
LAMPIRAN.....		50
	Data Variabel.....	50
	COMMON EFFECT MODEL	64
	FIXED EFFECT MODEL.....	65
	RANDOM EFFECT MODEL.....	66
	UJI CHOW	67
	UJI LAGRANGE MULTIPLIER	68
	UJI HAUSMAN	69
	CROSS-SECTION FIXED EFFECT	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Jumlah Tenaga Kerja 2016 dan 2022	2
Gambar 2 Grafik Produk Domestik Regional Bruto 2016 dan 2022.....	3
Gambar 3 Grafik UMK, Penyerapan Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah	5
Gambar 4 Kerangka Pemikiran Penyerapan Tenaga Kerja.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Uji Deskriptif Statistik.....	33
Tabel 2 Hasil Uji Chow.....	34
Tabel 3 Hasil Uji Hausman.....	35
Tabel 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	35
Tabel 5 Hasil Uji Fixed Effect Model.....	36
Tabel 6 Cross Section Effect.....	43

ABSTRAK

Penyerapan tenaga kerja masih menjadi salah satu masalah yang ada di Jawa Tengah. Karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang menggunakan dan dialirkan ke padat modal dari pada karya modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2016-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yaitu gabungan antara *cross sectional* dan *time series*, yang diolah menggunakan *evIEWS 12*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2022. Secara parsial variabel Produk Domestik Regional Bruto dan Penanaman Modal Dalam Negeri menunjukkan hasil positif dan tidak signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2022, sedangkan variabel Upah Minimum, Penanaman Modal Asing, dan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2022.

Kata Kunci : Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

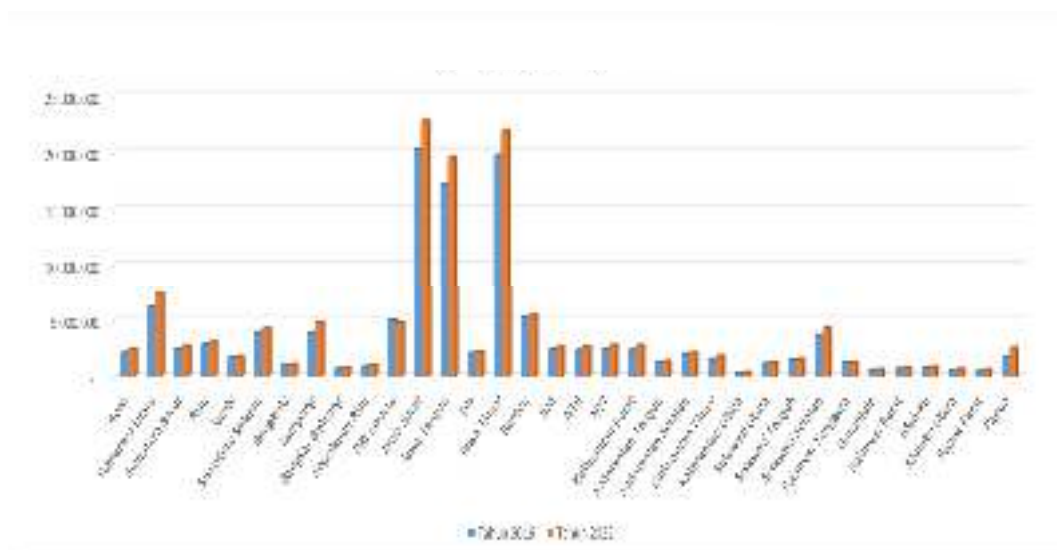
1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang tidak terlepas dari masalah keterkaitan dengan ketenagakerjaan dan masalah lapangan kerja juga belum dapat teratasi dan menjadi masalah paling penting di dalam pembangunan perekonomian. Lapangan kerja merupakan sumber pendapatan bagi angkatan kerja yang bekerja. Tinggi atau rendahnya jumlah pendapatan yang diperoleh dalam lapangan pekerjaan bisa menentukan kemakmuran atau kesejahteraan dalam seseorang dan keluarga. Selain itu lapangan kerja merupakan salah satu tempat bagi sumber daya manusia untuk mengekspresikan seseorang selaku pembuat alat. Kerja merupakan kegiatan untuk mengekspresikan kreativitas kemampuan manusia. Angkatan Kerja adalah individu yang bekerja di usia kerja yang memiliki kemampuan untuk menciptakan produk atau layanan dalam kegiatan produksi. Seseorang yang termasuk dalam kategori bekerja adalah individu yang secara aktif terlibat dalam proses produksi barang atau jasa selama satu minggu penuh tanpa adanya gangguan, dan memperoleh penghasilan per jam dalam satu minggu terakhir. Sementara seseorang yang tengah mencari pekerjaan juga termasuk dalam kategori angkatan kerja yang saat ini belum bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan.

Badan Pusat Statistik mencatat angkatan kerja di Indonesia pada periode Agustus 2022 mencapai 143,72 juta orang. Jumlah angkatan kerja tersebut meningkat 2,55% dibandingkan dengan periode Agustus 2021. Febryana (2016) menyatakan peningkatan angkatan kerja merupakan hal yang positif bagi pasar tenaga kerja, karena hal ini menunjukkan bahwa ada lebih banyak orang yang siap bekerja dan tersedia. Namun, penting untuk diingat bahwa peningkatan angkatan kerja tidak selalu berarti bahwa permintaan tenaga kerja akan meningkat secara proporsional. Beberapa faktor lain, seperti tingkat Pendidikan angkatan kerja, dapat mempengaruhi kemampuan pasar kerja untuk menyerap angkatan kerja yang tersedia.

Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi telah menyebabkan jumlah yang sangat besar, sehingga menghasilkan adanya peningkatan tenaga kerja yang terus-menerus bertambah, sementara di sisi lain adanya peningkatan kesempatan kerja relatif terbatas. Hal ini menyebabkan pengangguran semakin bertambah. Pengangguran merupakan masalah yang serius yang harus dihadapi baik negara berkembang maupun negara maju. Negara harus mengambil tindakan untuk mengurangi tingkat pengangguran untuk mengurangi masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya yang dapat disebabkan oleh pengangguran (Chusna, 2013).

Berikut grafik dari Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja di 35 Provinsi Indonesia pada tahun 2016 dan 2020,

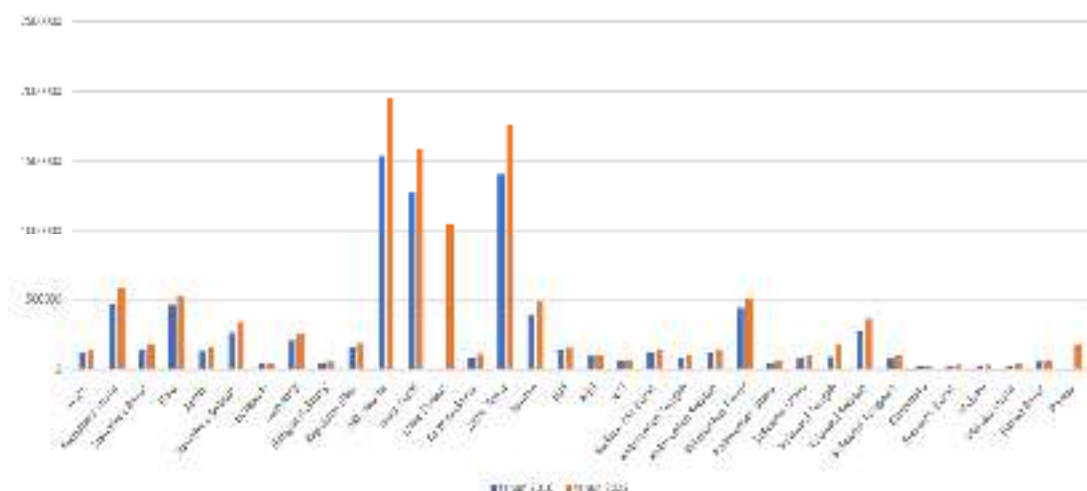


Gambar 1 Grafik Jumlah Tenaga Kerja 2016 dan 2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa Jumlah Tenaga Kerja dari 34 Provinsi di Indonesia, pada grafik yang berwarna biru adalah Jumlah Tenaga Kerja pada tahun 2016 dan grafik yang berwarna kuning adalah Jumlah Tenaga Kerja pada tahun 2022. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa Jumlah Tenaga Kerja setiap provinsi di Indonesia mengalami kenaikan, di mana Jumlah Tenaga Kerja di tahun 2016 lebih rendah dari pada Jumlah Tenaga Kerja di tahun 2022. Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Indonesia yang paling tinggi berada di Provinsi Jawa Barat yaitu pada tahun 2016 sebesar 20 juta jiwa dan di tahun 2022 sebesar 22 juta jiwa orang sedangkan Jumlah Tenaga Kerja paling terendah berada di Provinsi Kalimantan

Utara pada tahun 2016 yaitu sebesar 275.474 orang sedangkan di tahun 2022 yaitu sebesar 333 ribu jiwa. Jumlah Tenaga Kerja di Jawa Tengah merupakan peringkat ketiga di Indonesia yaitu di tahun 2016 sebesar 17 juta jiwa dan di tahun 2022 sebesar 19 juta jiwa.

Untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, pemerintah mengimplementasikan beberapa kebijakan salah satunya yaitu peningkatan struktur upah melalui kebijakan upah minimum. Pengimplementasian kebijakan upah minimum adalah tindakan atau kebijakan untuk meningkatkan pendapatan per individu yang bekerja sehingga tingkat rata-rata upah tenaga kerja juga meningkat. Selain kebijakan upah minimum ada beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yaitu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Penyerapan tenaga kerja sangat terkait dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), karena di dalamnya terdapat peningkatan permintaan tenaga kerja. Jika PDRB meningkat, maka akan terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi ketika produksi barang dan jasa atau PDRB juga mengalami peningkatan. (Emil dan Ria, 2021). PDRB memiliki pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi bahwa jika PDRB mengalami kenaikan, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan di seluruh sektor ekonomi di suatu kawasan meningkat.



Gambar 2 Grafik Produk Domestik Regional Bruto 2016 dan 2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto dari 34 Provinsi di Indonesia, pada grafik yang berwarna biru adalah PDRB pada tahun 2016 dan grafik yang berwarna kuning adalah PDRB pada tahun 2022. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa PDRB setiap provinsi di Indonesia mengalami kenaikan, di mana PDRB di tahun 2016 lebih rendah dari pada PDRB di tahun 2022. Pada grafik tersebut PDRB di Provinsi Indonesia yang tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta yaitu pada tahun 2016 sebesar 1.539 miliar rupiah dan di tahun 2022 sebesar 1.953 miliar rupiah sedangkan PDRB paling terendah berada di Provinsi Gorontalo pada tahun 2016 yaitu sebesar 235 miliar rupiah sedangkan di tahun 2022 yaitu sebesar 302 miliar rupiah. PDRB di Jawa Tengah merupakan peringkat keempat di Indonesia yaitu di tahun 2016 sebesar 849 miliar rupiah dan di tahun 2022 sebesar 1.050 miliar rupiah.

Selain PDRB yang mempengaruhi faktor penyerapan tenaga kerja, upah juga merupakan faktor yang sangat penting untuk mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Upah merupakan penerimaan imbalan kepada orang yang melakukan suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dalam upah tersebut bisa dalam bentuk uang yang telah ditetapkan oleh persetujuan atau perundang-undangan dan dibayarkan sesuai perjanjian kerja. Dalam hubungan antara upah dan penyerapan tenaga kerja ada yang menjelaskan bahwa pemberlakuan upah akan menyebabkan pengangguran, tetapi dari sisi lain pergeseran tersebut dapat menyebabkan perusahaan meningkatkan tenaga kerja dan laba menjadi maksimum (Rakhmawati & Boedirochminarni, 2018). Upah mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pasokan tenaga kerja. Ketika upah meningkat, permintaan terhadap tenaga kerja akan berkurang, karena beban yang dikeluarkan oleh perusahaan semakin bertambah dengan asumsi semua faktor lainnya tetap konstan. Menurut laporan dalam Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 rata-rata upah buruh di Indonesia sebesar 2,89 juta rupiah, akan tetapi di setiap daerah bisa berubah-ubah. Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ditetapkan oleh Gubernur dan telah ditetapkan hanya untuk pekerja yang masa kerjanya hanya satu tahun. Untuk pekerja yang masa kerjanya lebih dari satu tahun, upah tersebut tidak mengacu pada UMK yang ditetapkan di setiap daerah yang ditetapkan. Dalam UMK setiap pekerja akan

merundingkan besaran masing-masing upah dengan suatu perusahaan yang ditempati pekerja tersebut.

Investasi merupakan modal untuk melakukan pembangunan ekonomi di suatu negara, biasanya di negara-negara berkembang salah satu contohnya di Indonesia. Dalam melakukan pembangunan ekonomi, pemerintah memerlukan modal yang besar, tetapi pemerintah memiliki keterbatasan untuk menyediakan modal tersebut. Ada beberapa cara pemerintah untuk melakukan pengembangan ekonomi yaitu dengan cara mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan melalui berbagai kegiatan investasi dari dalam atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun luar negeri atau Penanaman Modal Asing (PMA) (Liana, Fitriyani, Asmini, & Ismawati, 2020). Di Indonesia sendiri sepanjang tahun 2022 sudah terealisasi investasi sebesar Rp. 1.207 triliun atau 54,2%, nilai investasi yang terealisasi tersebut merupakan penanaman modal dari asing (PMA). Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) capaian investasi tersebut naik sebesar 34% dari tahun 2021. Menurut dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah mencatat realisasi investasi sebesar 44,99 triliun, realisasi investasi tersebut terdiri dari PMA mencapai Rp. 26,82 triliun dan PMDN mencapai Rp. 18,17 triliun. Capaian realisasi tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 170.757 orang.



Gambar 3 Grafik UMK, Penyerapan Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha terus mendorong masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) dengan diterbitkannya Pergub No. 52 tahun 2015 yang isinya mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2025. Kebijakan Penanaman Modal Asing di Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar kawasan industri di Provinsi Jawa Tengah yaitu ada Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Industri Wjayakusuma, Kawasan Industri Bukit Semarang Baru, Kawasan Industri Candi, Kawasan Industri Candi, Kawasan Industri Terboyo, dan LIK Bugangan. Kebanyakan investasi yang masuk dari Asing dari sektor energi seperti listrik dan gas, tekstil serta alas kaki. Di tahun 2016 penanaman modal asing di Jawa Tengah sebesar US\$ 1,030. Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2016 pada proyek Penanaman Modal Asing terserap TKA sebanyak 892 orang dan TKI sebanyak 124.312 orang. Di tahun 2017 dan 2018 penanaman modal asing sebesar US\$ 2,372. Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2017 pada proyek Penanaman Modal Asing terserap TKA sebanyak 716 orang dan di tahun 2018 sebanyak 694 orang dan penyerapan tenaga kerja pada proyek Penanaman Modal Asing terserap TKI di tahun 2017 sebanyak 183.204 orang dan di tahun 2018 sebanyak 59.495 orang. Di tahun 2019 penanaman modal asing di Jawa Tengah sebesar US\$ 2,72 juta. Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2019 pada proyek Penanaman Modal Asing terserap TKA sebanyak 771 orang dan TKI sebanyak 65.363 orang. Di tahun 2020 penanaman modal asing sebesar US\$ 1.363 juta. Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2020 pada proyek Penanaman Modal Asing terserap TKA sebanyak 577 orang dan TKI sebanyak 98.445 orang. Di tahun 2021 penanaman modal asing sebesar US\$ 1.820. Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2021 pada proyek Penanaman Modal Asing terserap TKA sebanyak 788 orang dan TKI sebanyak 133.492 orang. Di tahun 2022 penanaman modal asing sebesar US\$ 33.895. Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2022 pada proyek Penanaman Modal Asing terserap TKA sebanyak 864 orang dan TKI sebanyak 123.267 orang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai alat yang berharga dalam menilai kemajuan kualitas pembangunan manusia dengan mengevaluasi aspek paling dasar pada kualitas hidup yang memiliki dampak sangat besar terhadap produktivitas seseorang dan kesejahteraan dalam hidup. Keterampilan dan kesehatan merupakan komponen paling dasar dalam IPM, hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas hidup pada manusia atau setiap individu. Semakin tingginya kualitas hidup dalam seseorang maka hal tersebut akan menunjang juga peningkatan produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan, dengan begitu semakin tingginya IPM akan juga mempengaruhi tenaga kerja dalam mencari pekerjaan. Menurut Bdn Pusat Statistik IPM di Indonesia di tahun 2022 mencapai 0,86% daripada di tahun 2020 disaat pandemik Covid-19 hanya 0,3%. Hal itu dikarenakan progress IPM di Indonesia terus membaik dengan keberhasilan penanganan pandemik Covid-19 dan pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa tengah pada tahun 2016-2022?
2. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa tengah pada tahun 2016-2022?
3. Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa tengah pada tahun 2016-2022?
4. Apakah Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2022?
5. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa tengah pada tahun 2016-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2022.

4. Untuk menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2022.
5. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan dapat dimanfaatkan oleh:

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperbanyak bahan referensi dan penelitian dalam pengembangan Ilmu Ekonomi Pembangunan.

2. Pemerintah

Bagi pemerintah khususnya di Jawa Tengah, dinas dan Lembaga serta instansi terkait, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan tambahan informasi dalam berbagai lembaga yang memiliki andil dalam pengambilan keputusan dan pembuat kebijakan yang memiliki hubungan dengan perkembangan penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah.

3. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan penyerapan tenaga kerja dilihat dari faktor Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Sistematika Penulisan

Peneliti memaparkan sistematika penulisan sebagai gambaran umum proposal skripsi. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kajian pustaka ini berisi teori-teori untuk memahami dan mendefinisikan Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Upah, Investasi, dan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bersumber dari kutipan buku, jurnal, dan beberapa literatur yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari topik yang dibahas. Bab ini juga menjelaskan data yang digunakan dalam penelitian serta sumber datanya.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi hasil temuan dari pengoperasian data yang telah dilakukan dengan metode analisis. Deskripsi serta uraian data penelitian serta penjabaran mengenai hasil analisis yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan beserta saran untuk memberikan solusi terhadap kekurangan yang telah didapatkan setelah penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian sebelumnya dapat memberikan informasi dan dasar untuk melakukan penelitian.

Sulistiawati (2012) melakukan penelitian yang mengkaji dan menganalisis pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi di Indonesia periode 2006-2010. Di penelitian ini menggunakan data sekunder time series. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa kenaikan upah akan mengurangi penyerapan tenaga kerja dengan produktivitas yang rendah, penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan penelitian dari Mahendra et. al, (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan, serta memediasi penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Dalam pengumpulan data dengan pencatatan secara langsung berupa data dari variabel upah minimum, tingkat pendidikan, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di periode 2014-2018 di Provinsi Bali. Di penelitian tersebut Teknik analisisnya menggunakan metode yang menguji keselarasan pengaruh variabel-variabel tersebut dengan hubungan sebab dan akibat (*path analysis*). Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut bahwa variabel upah minimum, tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali di periode 2014-2018, serta penyerapan tenaga kerja memediasi terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Hafiz et. al, (2021) melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui dari pengaruh PDRB, UMK, dan IPM terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Jawa Barat di periode 2010-2020. Di penelitian ini menjelaskan dalam pembangunan di suatu negara atau daerah yang paling penting yaitu tenaga kerja, tetapi yang menjadi suatu masalah yaitu ketika jumlah tenaga kerja yang tidak

setara dengan tersedianya lapangan kerja. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial PDRB, UMK, dan IPM berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan secara simultan variabel-variabel independen mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Jawa Barat. Begitu juga dengan penelitian Widagda et. al, (2019) yang membahas tentang pengaruh PDRB, UMK, dan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada Provinsi Bali. Penelitian ini dianalisis dari tahun 2010-2018 dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB dan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sandika et. al, (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk time series selama periode pengamatan dari tahun 2003-2012, dengan pengumpulan data melalui pencatatan data langsung dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan yang diperlukan untuk penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pelalawan tahun 2003-2012.

Tarman et. al, (2022) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini penulis ingin mengetahui dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia selama periode tahun 2010-2020. Dalam penelitian ini menggunakan prinsip dasar ekonomi klasik yang didasarkan pada teori bahwa perekonomian berfungsi dengan menggunakan faktor produksi secara maksimal dan mencapai tingkat kerja yang optimal, dengan kata lain perkembangan perekonomian itu tergantung dari pertumbuhan jumlah penduduk, tenaga kerja, dan penyerapan tenaga kerja yang maksimal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB dari tahun 2010-2019 mengalami peningkatan, sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan adanya Covid-19. Dan untuk tenaga kerja

pada tahun 2010-2011 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2012-2020 mengalami peningkatan.

Wildan (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Investasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah terhadap Penyerapan tenaga Kerja. Penelitian ini menggunakan data yang sama dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu menggunakan data sekunder yang dianalisis dengan metode kuantitatif regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Dengan menunjukkan bahwa hasil penelitian ini investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi dan upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bogor.

Ningrum (2008), melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji perkembangan penanaman modal asing dan perannya untuk menyerap tenaga kerja, dengan metode eksplorasi untuk menjelaskan karakteristik dan regresi panel untuk menghitung elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap Penanaman Modal Asing (PMA). Hasil data penelitian ini didapatkan beberapa temuan, yang pertama industri kimia dan farmasi merupakan industri yang nilainya paling besar terhadap PMA tetapi memberikan sedikit kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Kedua, industri tekstil paling besar terhadap menyerap tenaga kerja meskipun memiliki nilai investasi kecil terhadap PMA, dan yang terakhir analisa *pool least square regression* memperlihatkan bahwa dibutuhkan investasi untuk menyerap setiap satu tenaga kerja.

Arta (2013), melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan yang dari data kemudian data tersebut diproses dan menjadi informasi yang sangat berharga. Di penelitian ini berjudul Pengaruh PMA, PMDN, dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah dengan hasil PMA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sedangkan untuk Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah,

tetapi variabel-variabel di penelitian ini bersamaan berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Susanto (2014), melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penyerapan tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia terhadap upah minimum di lima provinsi di Indonesia, dengan data panel dan dengan metode pooled least square yang dianalisis dengan Eviews 7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap upah minimum provinsi adalah negatif, sehingga ketika penyerapan tenaga kerja terjadi kenaikan hal tersebut menyebabkan menurunnya upah minimum provinsi dan indeks pembangunan manusia akan memberikan dampak kenaikan dalam upah minimum provinsi.

Berdasarkan kajian pustaka penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu dari Hafiz et. al, tahun 2021 dan Sandika et. al, tahun 2014. Penelitian tersebut dijadikan rujukan karena menggunakan metode penelitian yaitu data sekunder dan data panel yang diregresi linier berganda yang sama. Namun dalam penelitian tersebut terdapat variabel independen yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sehingga dari kesamaan tersebut sebelumnya, penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja adalah transaksi antara pembeli (perusahaan) dan penjual (pekerja) yang mengalokasikan pekerja untuk pekerjaan dan menkoordinasikan keputusan pekerjaan, dimana pada beberapa pasar tenaga kerja diwakili serikat pekerja yang menegakkan aturan formal untuk mengatur transaksi yang terjadi. Menurut Sumarsono (2003), bahwa pasar tenaga kerja adalah proses berkumpulnya para pencari kerja dan lowongan. Setiap lowongan memiliki posisi yang berbeda, dan pemberi kerja memiliki kriterianya sendiri untuk mengevaluasi tingkat pendidikan, karakteristik pribadi, keterampilan atau kemampuan. Jika kita memahami konsep pasar yaitu sebagai proses produksi yang berupa jual beli barang dan jasa, berbeda dengan konsep pasar tenaga kerja yang dimana tenaga kerja merupakan bagian dari faktor produksi. Tenaga kerja sebagai masukan dalam suatu

proses produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Unsur tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja menunjukkan kuatnya penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Pelaku pasar tenaga kerja yaitu pencari kerja, pemberi kerja, dan perantara atau mediator. Setiap pihak yang dibagikan mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Pencari kerja mempunyai satu tujuan yaitu untuk membiayai kebutuhannya. Begitu juga dengan pengusaha mempunyai tujuan untuk mengupayakan keuntungan maksimal, dan perantara atau mediator pasar tenaga kerja adalah lembaga pengembangan keterampilan, penghubung antara pencari kerja dan pemberi kerja, serta lembaga yang melindungi kepentingan pekerja, pengusaha, dan wiraswasta.

2.2.2 Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun dan terlibat melakukan aktivitas pekerjaan, sebagai pekerja maupun yang mencari pekerjaan. Menurut dari Badan Pusat Statistik di Indonesia mengambil penduduk yang berumur 10 tahun keatas sebagai penduduk usia kerja. Akan tetapi pada tahun 1998 Indonesia mulai menggunakan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas sebagai penduduk usia kerja atau lebih tua batas usia kerja pada periode sebelumnya.

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Bab 1 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam suatu negara pada umumnya penduduk terbagi menjadi dua kelompok, yang pertama penduduk yang telah memasuki usia bekerja, yang kedua penduduk dengan umur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah dan mengurus rumah tangga dan lainnya.

2.2.3 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha (Boediono, 1984).

Menurut Simanjutak (2001) teori permintaan suatu barang menjelaskan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga tersebut. Dalam teori

tersebut dalam tenaga kerja juga menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan antara upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk diperkerjakan.

Penyerapan tenaga kerja akan meningkat apabila sektor-sektor ekonomi. Sektor ekonomi merupakan merupakan sektor yang dapat menyumbangkan nilai produksinya terhadap perekonomian, yang akan menjadi alat dalam mencapai pembangunan ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan penduduk dengan memaksimalkan fungsi sektor ekonomi baik dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau investasi maupun penyerapan tenaga kerja (Paramita dan Ratna, 2017).

2.2.4 Teori Permintaan Tenaga Kerja

Terkait dengan tenaga kerja, permintaan akan tenaga kerja menjelaskan korelasi antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang akan diperkerjakan. Permintaan produsen dalam tenaga kerja tidak sama dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Akan tetapi perusahaan akan memproduksi barang dan jasa kepada konsumen masyarakat dengan mempekerjakan seseorang. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk diperkerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu (Sholeh, 2007). Permintaan tenaga kerja sendiri menjelaskan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang memiliki hubungan arah yang negatif, yang maknanya ketika upah naik atau meningkat maka jumlah tenaga kerja yang diminta akan menurun. Begitu juga, jika permintaan barang produksi meningkat maka perusahaan akan menyerap lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan dalam membuat barang produksi.

2.2.5 Teori Penawaran Tenaga Kerja

Kepuasan dari individu dilihat dari *leisure* (waktu luang), ketika mereka menggunakan waktu luang tersebut individu juga akan merasakan kendala atau masalah ketika menghadapi yaitu kendala pendapatan dan waktu. Solusi dalam permasalahan yang dihadapi ini yaitu dengan mengubah pendapatan sebagai bentuk

penggantian, di mana jumlah jam kerja yang diberikan akan ditentukan berdasarkan tingkat gaji dan upah.

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah jam tenaga kerja yang dapat disediakan oleh perusahaan pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumber daya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya (Sholeh, 2007).

2.2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang sangat penting dalam mengetahui kemajuan pembangunan ekonomi dan ekonomi suatu negara dalam periode tertentu yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), dalam bahasa Inggris biasa disebut *Gross Domestic Product* (GDP) dengan harga yang berlaku ataupun harga yang tetap. Kondisi perekonomian negara melibatkan perekonomian wilayah provinsi maupun kabupaten atau kota. Dalam mengukur kondisi perekonomian di suatu daerah dapat menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah masing-masing berbeda, hal itu tergantung dari kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia di daerah itu sendiri. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi.

Secara konsep perhitungan PDB dan PDRB menggunakan tiga macam pendekatan yaitu Pendekatan Produksi, Pendekatan Pengeluaran, dan Pendekatan Pendapatan:

a. Pendekatan Produksi

Menghitung output nasional dengan menjumlahkan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam periode tertentu. Menghitung nilai tambah dari setiap tahapan produksi untuk menghindari perhitungan ganda.

$$Y = (P_1 \times Q_1) + (P_2 \times Q_2) + (P_3 \times Q_3) + \dots + (P_n \times Q_n)$$

b. Pendekatan Pengeluaran

Menjumlahkan semua nilai akhir dari barang dan jasa seluruh sektor perekonomian dalam suatu negeri dan dalam periode tertentu. Dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi Lembaga yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, investasi, dan perubahan impor dan ekspor

neto.

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

c. Pendekatan Pendapatan

Menjumlahkan semua dari segi pendapatan seluruh sektor perekonomian dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, seperti upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung netto pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung dalam suatu negeri dan dalam periode tertentu.

$$Y = w + r + i + p$$

2.2.7 Upah Minimum

Upah merupakan peranan penting untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang. Upah merupakan pengganti dari barang dan jasa yang berupa uang dari pihak perusahaan yang telah menerima pekerjaan atau yang bekerja dalam suatu perusahaan. Menurut undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 30 Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor: Per-01/Men/1999 dalam pasal 1 ayat 1 Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Ketika upah minimum

sudah ditetapkan maka dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, dapat dilihat dari teori permintaan tenaga kerja, kenaikan upah akan menurunkan permintaan tenaga kerja, sehingga dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja. Begitupun sebaliknya, ketika tingkat upah menurun maka permintaan akan tenaga kerja akan meningkat. Akan tetapi berbeda dalam teori penawaran tenaga kerja, ketika upah meningkat maka banyak angkatan kerja yang akan menawarkan jasa dalam suatu perusahaan.

Menurut (Agustine dan Ariawan, 2014) pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Peraturan dalam pengupahan yang telah ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak diperbolehkan lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja khusus pada perusahaan swasta terdapat ketentuan upah minimum Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Permasalahan para pekerja yaitu masih banyaknya perusahaan yang memberikan upah dibawah upah minimum yang telah ditentukan oleh Kabupaten/Kota. Masih banyak perusahaan yang memberikan upah dibawah upah minimum yang jauh dari kebutuhan pekerja, sehingga bisa dikatakan belum berhasil menciptakan hubungan industrial yang diharapkan. (Agustine,2014).

2.2.8 Investasi

Investasi adalah sebuah kegiatan atau aktivitas bentuk penanaman modal semacam aset atau dana pada perusahaan atau individu dengan jangka waktu tertentu yang akan mendapatkan keuntungan atau pengembalian yang lebih tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (2022) investasi merupakan kegiatan ekonomi dalam bidang produksi dengan harapan memperoleh keuntungan di

masa kedepannya. Menurut prinsip investasi dibedakan menjadi dua, yang pertama ada investasi finansial yang berupa uang tunai, tabungan, deposito, modal dan penyertaan, surat berharga, obligasi dan lain-lain. Kedua investasi non-finansial yang berupa investasi fisik atau barang modal serta dalam bentuk persediaan.

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000:367 dalam jurnal Sandika et. al, 2014).

Dengan adanya investasi maka akan terciptanya proses produksi baru pada perusahaan sehingga akan menyerap banyak tenaga kerja, dengan banyaknya penyerapan tenaga kerja maka hal tersebut akan mengurangi angka pengangguran, dan investasi berperan penting dalam pembangunan perekonomian, maka dari itu pemerintah meningkatkan perekonomian melalui dana dari pemerintah maupun pihak swasta yang di salurkan pada kegiatan perekonomian dengan mengembangkan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun dari Penanaman Modal Asing (PMA).

Menurut Pasal 5 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas,
- b. Membeli saham, dan
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.9 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan aktivitas atau kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh modal domestik atau modal dalam negeri itu sendiri, dari perorangan maupun badan usaha. Pasal 5 ayat 1 UUPM menjelaskan bahwa kegiatan PMDN dapat dijalankan secara badan hukum, non badan hukum, atau usaha perseorangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (UUPM), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Maksud dari penanaman modal dalam negeri yaitu perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia (PT), atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Indonesia.

2.2.10 Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (UUPM), Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan modal dalam negeri.

Adanya Penanaman Modal Asing di suatu negara atau di suatu daerah terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh negara atau daerah tersebut yaitu terbukanya lapangan kerja baru agar angka pengangguran berkurang dan modal baru untuk mendanai beberapa sektor yang kekurangan dana.

Penanaman Modal Asing juga bisa diartikan sebagai alat untuk perusahaan termasuk temuan baru milik asing dan bahan-bahan dari asing atau luar negeri yang masuk ke dalam wilayah Indonesia selama barang-barang tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia. Sebagian dari hasil yang berdasarkan undang-undang diperkenankan untuk ditransfer, tetapi digunakan untuk membiayai perusahaan Indonesia yang kekurangan dana. (Sandika, 2014).

Penanaman Modal Asing terbesar kawasan industri di Provinsi Jawa Tengah yaitu ada Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Industri Wjayakusuma, Kawasan Industri Bukit Semarang Baru, Kawasan Industri Candi, Kawasan Industri Candi, Kawasan Industri Terboyo, dan LIK Bugangan. Di tahun 2022 investasi di Jawa Tengah mencapai Rp. 65,54 Triliun. Kebanyakan investasi yang masuk dari Asing dari sektor energi seperti listrik dan gas, tekstil serta alas kaki. Dari banyaknya kawasan industri di Jawa Tengah ada dua wilayah yang diprioritaskan untuk investasi yaitu Kawasan Industri Kendal dan

Kawasan Industri Terpadu Batang. Pasalnya kedua wilayah tersebut sangat berpotensi bagi investor untuk berinvestasi khususnya pemilik modal asing. Hal tersebut dikarenakan mudahnya mengurus perizinan untuk para investor.

2.2.11 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia berperan sangat penting untuk mengatur tolak ukur tentang pengaruh kebijakan ekonomi pada kualitas hidup dalam negara maju, berkembang ataupun terbelakang. Menurut Todaro dan Smtih (2012) dalam jurnal Susanto (2014) Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang mengukur pembangunan ekonomi nasional sosial, didasarkan pada penggabungan tindakan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan sebagainya. *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 memperkenalkan dan mempublikasikan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di Indonesia IPM terbentuk dari 3 aspek yaitu:

- a. Angka harapan hidup ketika lahir
- b. Pendidikan

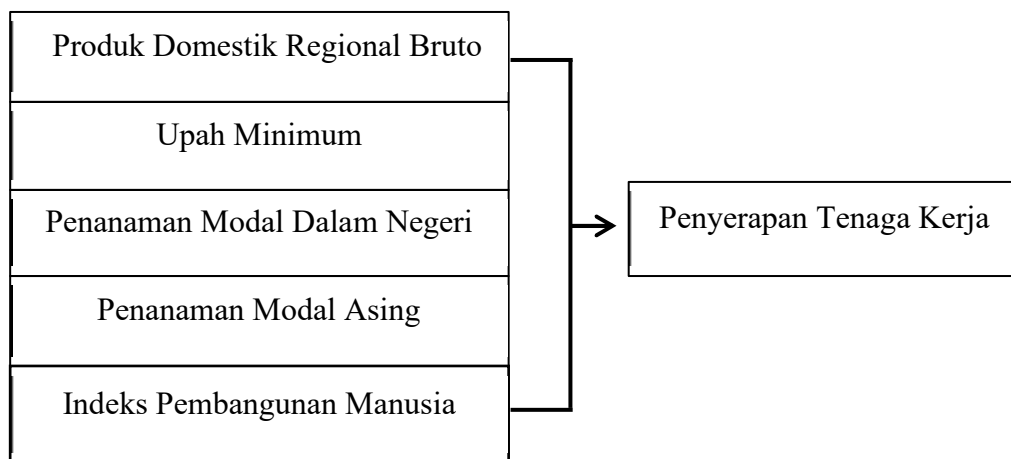
Pendidikan dihitung melalui rata-rata total tahun pendidikan jenjang formal penduduk usia 15 tahun ke atas serta angka melek huruf pada total penduduk untuk yang berusia 15 tahun ke atas.

- c. Standar layak hidup berdasarkan pengeluaran per kapita dengan Produk Nasional Bruto (PDB). IPM dihitung dengan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pengeluaran}} \times 100$$

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran variabel yang terkait dengan permasalahan utama yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan tinjauan pustaka. Bentuk kerangka pemikiran dapat berupa diagram atau skema.



Gambar 4 Kerangka Pemikiran Penyerapan Tenaga Kerja

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam penelitian sehingga keberadaannya perlu dibuktikan. Hipotesis dapat terbentuk dari jawaban sementara rumusan masalah dalam penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini adalah:

- Secara parsial diduga Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2022.
- Secara parsial diduga Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2022.
- Secara parsial diduga Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2022.
- Secara parsial diduga Penanaman Modal Asing berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2022.

- e. Secara parsial diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang spesifikasinya terstruktur, terencana, dan sistematis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menggunakan alat analisis data panel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data panel merupakan gabungan dari data *cross section* (antar daerah) dan data *time series* (runtutan waktu). Data yang dikumpulkan dan dicatat dengan jangka waktu yang teratur, yaitu data dari tahun 2016-2022 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel dependen yaitu Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh variabel-variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Indeks Pembangunan Manusia. Selain menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), data yang diperoleh secara tidak langsung dikutip dari buku-buku dan bacaan ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah, dan variabel independen terdiri empat variabel yaitu Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah, Upah Minimum di Provinsi Jawa Tengah, Investasi di Provinsi Jawa Tengah, dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan adalah Penyerapan Tenaga Kerja diambil dari data BPS tahun 2016-2022. Penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya jumlah angkatan kerja yang bekerja. Menggunakan data dari penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota yang bekerja di

Provinsi Jawa tengah dan satuan jiwa untuk mengukur Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah.

3.1.2 Variabel Independen

Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Produk Domestik Regional Bruto

Penelitian ini mengambil data dari BPS tahun 2016-2022, menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan satuan Miliar Rupiah sebagai ukuran untuk mengukur Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah.

2. Upah Minimum

Penelitian ini mengambil data dari BPS tahun 2016-2022, menggunakan data dari keputusan Gubernur 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan satuan Juta Rupiah sebagai ukuran untuk mengukur Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah.

3. Penanaman Modal Dalam Negeri

Penelitian ini mengambil data dari BPS tahun 2016-2022, menggunakan data realisasi penanaman modal dalam negeri menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan satuan Juta Rupiah sebagai ukuran untuk mengukur Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah.

4. Penanaman Modal Asing

Penelitian ini mengambil data dari BPS tahun 2016-2022, menggunakan data realisasi penanaman modal asing menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan satuan Juta Rupiah sebagai ukuran untuk mengukur Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah.

5. Indeks Pembangunan Manusia

Penelitian ini mengambil data dari BPS tahun 2016-2022, menggunakan data capaian pembangunan manusia berbasis komponen

angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai ukuran untuk mengukur Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah.

3.3 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data time series dan cross section. Data time series merupakan kumpulan data dengan jangka waktu tertentu. Data cross section merupakan kumpulan data dari sampel (Widarjono, 2018). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan data panel, dengan estimasi metode *Ordinary Least Square* serta menggunakan alat pengolahan dengan program E-views 12 untuk mengestimasi data.

3.4 Metode Regresi Data Panel

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 Upah_{it} + \beta_3 PMDN_{it} + \beta_4 PMA_{it} + \beta_5 IPM_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y	: Penyerapan Tenaga Kerja (jiwa)
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto (miliar rupiah)
UMK	: Upah Minimum Kabupaten/Kota (ribu rupiah)
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri (juta rupiah)
PMA	: Penanaman Modal Luar Negeri (juta rupiah)
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
i	: Cross Section (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)
t	: Time Series (tahun 2016-2022)
β_0	: Koefisien intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	: Koefisien
e	: residual

3.5 Metode Estimasi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji data menggunakan model yang harus diteliti terlebih dahulu yaitu:

1. *Common Effect Model (CEM)*

Data panel dapat diestimasi dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Common Effect Model merupakan penggabungan data time series dan cross section tanpa melihat perbedaan waktu dan individu. Selanjutnya diregresi menggunakan metode Ordinary Last Square (OLS). Model persamaan *Common Effect* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRBit + \beta_2 UMKit + \beta_3 PMDNit + \beta_4 PMA \\ + \beta_5 IPM + e_{it}$$

2. *Fixed Model Effect (FEM)*

Fixed Model Effect merupakan model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep antar individu namun antar waktu memiliki intersep yang sama. Teknik estimasi yang digunakan yaitu menggunakan variabel dummy yang berfungsi untuk mengetahui perbedaan intersep. Model persamaan *Fixed Effect* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRBit + \beta_2 UMKit + \beta_3 PMDNit + \beta_4 PMA \\ + \beta_5 IPM + \alpha_i D_i + e_{it}$$

Keterangan:

D : Dummy

3. *Random Effect Model (REM)*

Random Effect Model merupakan metode estimasi data panel yang memungkinkan adanya variabel gangguan (*error term*) yang berhubungan antar waktu dan antar individu. Model persamaan Random Effect adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRBit + \beta_2 UMKit + \beta_3 PMDNit + \beta_4 PMA \\ + \beta_5 IPM + \alpha_i D_i + \varepsilon_i + e_{it}$$

3.6 Menentukan Model Estimasi Regresi Data Panel

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan melakukan uji melalui langkah estimasi dalam menentukan model terbaik. Uji yang dilakukan adalah Uji Chow untuk menentukan model FEM atau CEM untuk hasil regresi terbaik. Uji Hausman untuk menentukan model REM atau FEM untuk hasil regresi terbaik. Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk menentukan Model REM atau FEM untuk hasil regresi terbaik. Adapun metode yang paling baik untuk digunakan, sebagai berikut:

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hipotesis yang dibentuk adalah:

H_0 : *Common Effect* merupakan model terbaik

H_a : *Fixed Effect* merupakan model terbaik

Selanjutnya adalah mengasumsikan model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian yaitu antara common effect atau fixed effect. Dapat dilihat jika nilai signifikan $< \alpha = 0,10$ maka menolak H_0 , sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa model fixed effect merupakan model terbaik. Jika nilai signifikan $> \alpha = 0,10$ maka gagal menolak H_0 sehingga dapat disimpulkan bahwa model common effect merupakan model terbaik.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan perbandingan fixed effect model atau random effect model yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Hipotesis yang dibentuk adalah:

H_0 : *Random effect* merupakan model terbaik

H_a : *fixed effect* merupakan model terbaik

Selanjutnya adalah mengasumsikan model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian yaitu antara *random effect* atau *fixed effect*. Dapat dilihat jika nilai signifikan $< \alpha = 0,05$ maka menolak H_0 , sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa model fixed effect merupakan model terbaik. Jika nilai

signifikan $> \alpha = 0,05$ maka gagal menolak H_0 sehingga dapat disimpulkan bahwa model *random effect* merupakan model terbaik.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan perbandingan penggunaan model terbaik antara *common effect* model menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)* dengan *random effect model*. Hipotesis yang dibentuk adalah:

H_0 : *Common effect* merupakan model terbaik

H_a : *Random effect* merupakan model terbaik

Uji LM didasarkan pada distribusi *Chi-squares* dengan *degree of freedom* sejumlah variabel independen. Dapat dilihat jika nilai probabilitas Breusch-pagan $< \alpha = 0,05$ maka menolak H_0 , sehingga menghasilkan kesimpulan *common effect* merupakan model terbaik. Jika nilai probabilitas $> \alpha = 0,10$ maka gagal menolak H_0 atau menerima H_a yang berarti *random effect* merupakan model terbaik.

3.7 Uji Statistik

Pengujian analisis statistik memiliki tujuan untuk melihat dan mengetahui tingkat signifikan dan kesesuaian dengan variabel yang dianalisis. Dapat dijelaskan mengenai tingkat signifikan dan kesesuaian variabel maka dilakukan beberapa langkah pengujian sebagai berikut:

3.7.1 Koefisien Determinasi (R-square / R^2)

Pengujian ini menjelaskan untuk mengetahui proporsi atau persentase variasi total variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R^2 ini mempresentasikan seberapa besar pengaruh variabel independen menjelaskan variabel dependen. Jika hasil R^2 lebih kecil dari nol, maka variabel independen menjelaskan bahwa variabel dependen mempunyai kemampuan yang kurang. Jika hasil R^2 adalah 0, maka tidak ada hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dan semakin tingginya hasil R^2 , maka semakin besar juga penjelas antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.7.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F dilakukan untuk mengetahui variabel independen secara keseluruhan untuk memengaruhi variabel dependen. Hipotesis yang digunakan uji F adalah:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, variabel independen tidak berpengaruh variabel dependen

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, variabel independen mempengaruhi variabel dependen

Kesimpulan dari hipotesis diatas yaitu jika F-stat memiliki nilai probabilitas $> \alpha = 0,05$, maka akan gagal menolak H_0 , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai F-stat $< \alpha = 0,05$, maka menolak H_0 , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T)

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara individual atau satu per satu mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis yang digunakan untuk uji t adalah:

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (X_1)

$H_0 : \beta_1 \geq 0$, Tidak terdapat pengaruh signifikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja

$H_a : \beta_1 < 0$, terdapat pengaruh signifikan Produk Domestik Regional (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja

2. Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan tenaga kerja

$H_0 : \beta_2 \geq 0$, Tidak terdapat pengaruh signifikan Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga kerja

$H_a : \beta_2 \leq 0$, terdapat pengaruh signifikan Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga kerja

3. Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan tenaga kerja

$H_0 : \beta_3 \geq 0$, Tidak terdapat pengaruh signifikan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja

$H_a : \beta_3 \leq 0$, terdapat pengaruh signifikan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja

4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan tenaga kerja

$H_0 : \beta_4 \geq 0$, Tidak terdapat pengaruh signifikan Indeks Pembangunan Manusia terhadap penyerapan tenaga kerja

$H_a : \beta_4 < 0$, terdapat pengaruh signifikan Indeks Pembangunan Manusia terhadap penyerapan tenaga kerja

Kesimpulan diambil berdasarkan hipotesis yang dibentuk. Uji T membandingkan nilai t hitung dalam tabel. Jika nilai t hitung > nilai t kritis maka menolak H_0 , sehingga variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai t hitung < nilai t kritis maka gagal menolak H_0 , sehingga variabel independent tidak mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah menggunakan model data panel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dalam bentuk cross section dan time series dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2022. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Produk Domestik regional Bruto, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Indeks Pembangunan Manusia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel dependen yaitu Penyerapan tenaga Kerja dalam satuan jiwa. Variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto dalam satuan miliar rupiah, Upah Minimum dalam satuan ribu rupiah, Penanaman Modal Dalam Negeri dalam satuan juta rupiah, Penanaman Modal Asing dalam satuan juta rupiah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah dalam kurun waktu 2016-2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data panel dengan menggunakan software Eviews 12.

Deskriptif data pada penelitian ini menjelaskan nilai mean, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Deskriptif Statistik

	TK	PDRB	PMDN	PMA	UPAH	IPM
Mean	499599	27,646	788377,	186045	1792158	72,121
Maximum	994091	152,999	164189	9424590	2835021	84,350
Minimum	57133	5,522	0	0	1265000	63,980
Std. Dev	200352,5	25,587	182723	822839	295875,	4,498
Observations	245	245	245	245	245	245

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah data setiap variabel yaitu sebanyak 245. Jumlah variabel berasal dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016-2022. Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa Penyerapan tenaga kerja mempunyai nilai minimum sebesar 57.133 jiwa dan nilai maksimum sebesar 994.091 jiwa, hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya Penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berkisar antara 57.133 jiwa sampai 994.091 jiwa dengan nilai rata-rata 499.599 jiwa pada standar deviasi 200.352,5 jiwa. Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa Produk Domestik Regional Bruto mempunyai nilai minimum sebesar 5,5 miliar rupiah dan nilai maksimum sebesar 152,9 miliar rupiah, hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berkisar antara 5,5 miliar rupiah sampai 152,9 miliar rupiah dengan nilai rata-rata 25 miliar rupiah pada standar deviasi 25.587 miliar rupiah. Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa Upah Minimum mempunyai nilai minimum sebesar Rp. 1.265.000 dan nilai maksimum sebesar Rp. 2.835.021, hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berkisar antara Rp. 1.265.000 sampai Rp. 2.835.021 dengan nilai rata-rata Rp. 1.792.158 pada standar deviasi 295.875,3 ribu rupiah.

Berdasarkan Tabel 4.1 Penanaman Modal Dalam Negeri mempunyai nilai minimum sebesar Rp. 0 dan nilai maksimum sebesar 164 juta rupiah, hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berkisar antara 0 sampai 164 juta rupiah dengan nilai rata-

rata sebesar 78 juta rupiah pada standar deviasi 1.827.230 rupiah. Berdasarkan tabel 4.1 Penanaman Modal Asing mempunyai nilai minimum sebesar Rp. 0 dan nilai maksimum sebesar 94 juta rupiah, hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya Penanaman Modal Luar Negeri Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berkisar antara 0 sampai 94 juta rupiah dengan nilai rata-rata sebesar 18 juta rupiah pada standar deviasi 822.839 rupiah. Berdasarkan Tabel 4.1 Indeks Pembangunan Manusia mempunyai nilai minimum sebesar 63,98 dan nilai maksimum sebesar 84,35, hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berkisar antara 63,98 sampai 84, 35 dengan nilai rata-rata sebesar 72,12 pada standar deviasi 4,49.

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.1.1 Pemilihan Model Regresi

a. Uji Chow

Uji chow digunakan untuk membandingkan atau memilih model terbaik antara *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas (p) untuk *Cross-Section F*. Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Common Effect Model*, sedangkan jika $p < 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*.

H_0 : *Common effect* lebih baik

H_a : *Fixed effect* lebih baik

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-Section F	312.774673	(34,205)	0.0000
Cross-Section Chi-Square	972.142190	34	0,0000

Berdasarkan tabel diatas hasil nilai statistik cross-section F sebesar 312.774673 dengan nilai probabilitas $0.0000 < \alpha 0,05$ maka secara menolak H_0 . Sehingga dalam Uji Chow model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

b. Uji Hausman

Uji *Hausman* digunakan untuk memilih antara model Random Effect dan Fixed Effect maka dilakukan uji hausman dengan hipotesis sebagai berikut:

H0 : *Random Effect* lebih baik

Ha : *Fixed Effect* lebih baik

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Probabilitas
Cross-section random	56.592937	5	0.0000

Berdasarkan tabel diatas hasil nilai distribusi statistic Chi Square sebesar 56.592937 dengan nilai probabilitas $0.0000 < \alpha$ 0,05 maka secara statistik menolak H0. Sehingga dalam Uji Hausman, model yang digunakan yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

c. Uji Lagrange Multiplier (Uji LM)

Uji lagrange multiplier digunakan untuk memilih model antara *Common Effect* dengan *Random Effect* maka dilakukan uji hipotesis sebagai berikut:

H0 : *Common Effect* lebih baik ‘

Ha : *Random Effect* lebih baik

Tabel 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Test Hypothesis			
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	580.2188 (0.0000)	1.952167 (0.1624)	582.1710 (0.0000)
Honda	24.08773	-1.397200	16.04463

	(0.0000)	(0.9188)	(0.0000)
King-Wu	24.08773 (0.0000)	-1.397200 (0.9188)	8.040984 (0.0000)
Standardized Honda	25.36183 (0.0000)	-1.087705 (0.8616)	13.60730 (0.0000)
Standardized King-Wu	25.36183 (0.0000)	-1.087705 (0.8616)	6.005478 (0.0000)
Gourieroux, et al.	-	-	580.2188 (0.0000)

Pada tabel 4.4 diatas nilai probabilitas Breusch-pagan sebesar 0.000 $< \alpha$ 0,05 maka menolak H_0 . Sehingga model yang digunakan adalah model *Random Effect*.

4.3 Estimasi Model Fixed Effect

Tabel 5 Hasil Uji Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-144142.9	260064.2	-0.554259	0.5800
PDRB	64.97738	219.0508	0.296631	0.7670
UMK	0.027111	0.015845	1.711000	0.0886
PMDN	0.000359	0.000835	0.429735	0.6678
PMA	0.005854	0.001751	3.343625	0.0010
IPM	8208.207	3966.276	2.069501	0.0398
R-squared	0.992636			
Adjust R-Square	0.991236			
F-Statistic	708.5794			
Prob F-statistic	0.000000			

Dari tabel diatas tersebut dapat disusun persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 UMK_{it} + \beta_3 PMDN_{it} + \beta_4 PMA_{it} + \beta_5 IPM_{it} + e_{it}$$

$$Y = -144142.9 + 64.97738(PDRB) + 0.027111(UMK) + 0.000359(PMDN) + 0.005854(PMA) + 8208.207(IPM)$$

Dimana:

Y	: Penyerapan Tenaga Kerja (jiwa)
β_0	: Koefisien intersep
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto (miliar rupiah)
UMK	: Upah Minimum Kabupaten/Kota (ribu rupiah)
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri (juta rupiah)
PMA	: Penanaman Modal Luar Negeri (juta rupiah)
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
i	: Cross Section (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)
t	: Time Series (tahun 2016-2022)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	: Koefisien
e	: residual

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto naik 1 miliar rupiah maka akan meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja sebesar 64.97738 jiwa.
2. Upah Minimum naik 1 ribu rupiah maka akan meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja sebesar 0.027111 jiwa.
3. Penanaman Modal Dalam Negeri naik 1 juta rupiah maka akan menaikkan Penyerapan Tenaga Kerja sebesar 0.000359 jiwa.
4. Penanaman Modal Asing naik 1 juta rupiah maka akan menaikkan Penyerapan Tenaga Kerja sebesar 0.005854 jiwa.
5. Indeks Pembangunan Manusia naik 1 maka akan menaikkan Penyerapan Tenaga Kerja sebesar 8208.207 jiwa.

4.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa baik kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil

estimasi yang ditunjukkan variabel Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan nilai R^2 sebesar 0.992636 atau 99,26 persen. Sehingga variabel Penyerapan Tenaga Kerja dapat dijelaskan oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 99,26 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model sebesar 0,74 persen.

4.5 Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independent memengaruhi variabel dependen secara bersama-sama memengaruhi atau tidak. Hasil estimasi yang dilakukan menunjukkan nilai F-statistik sebesar 708.5794 dengan probabilitas F sebesar $0.000000 < 0,05$ maka akan menolak H_0 . Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2022.

4.6 Uji Individual (Uji T)

a. Variabel Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan hasil estimasi pada model *Fixed Effect* menjelaskan bahwa nilai koefisien dari variabel Produk Domestik Regional Bruto sebesar 64.97738 dan nilai probabilitasnya sebesar $0.7670 > 0,10$ menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah. Dengan demikian, hipotesis bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah terbukti.

b. Variabel Upah Minimum

Berdasarkan hasil estimasi pada model *Fixed Effect* menjelaskan bahwa nilai koefisien dari Upah Minimum sebesar 0.027111 dan nilai

probabilitasnya sebesar $0.0886 > 0,10$ yang menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah. Dengan demikian, hipotesis bahwa variabel Upah Minimum berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah terbukti.

c. Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri

Berdasarkan hasil estimasi pada model Fixed Effect menjelaskan bahwa nilai koefisien dari Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 0.000359 dan nilai probabilitasnya sebesar $0.6678 > 0,10$ yang menunjukkan bahwa variabel Penanaman Modal Dalam Negeri secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah. Dengan demikian, hipotesis bahwa variabel Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah terbukti.

d. Variabel Penanaman Modal Asing

Berdasarkan hasil estimasi pada model Fixed Effect menjelaskan bahwa nilai koefisien dari Penanaman Modal Asing sebesar 0.005854 dan nilai probabilitasnya sebesar $0.0010 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel Penanaman Modal Asing secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah. Dengan demikian, hipotesis bahwa variabel Penanaman Modal Asing berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah terbukti.

e. Variabel Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil estimasi pada model Fixed Effect menjelaskan bahwa nilai koefisien dari Indeks Pembangunan manusia sebesar 8208.207 dan nilai probabilitasnya sebesar $0.0398 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah. Dengan demikian, hipotesis bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah terbukti.

4.7 Pembahasan

a. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil uji t menunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar $0.7670 > \alpha$ (0,10) bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien sebesar 64.97738. Secara teori hal tersebut tidak sependapat dengan penelitian (Indradewa, 2015), yang menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang artinya naiknya nilai Produk Domestik regional Bruto akan meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja, begitupun sebaliknya ketika nilai Produk Domestik Regional Bruto menurun untuk Penyerapan Tenaga Kerja juga akan menurun. Pasar tenaga kerja akan mengikuti apa yang terjadi di pasar barang, apabila barang dan jasa yang diproduksi naik maka jumlah tenaga kerja juga akan meningkat, maka dari itu permintaan barang dan jasa dalam perekonomian mempengaruhi tingkat output yang diproduksi. akan tetapi di Provinsi Jawa Tengah permintaan barang dan jasa menurun, dikarenakan ada beberapa nilai tambah barang dan jasa yang tidak terhitung atau tidak dihitung oleh barang dan jasa yang akan diproduksi dan menyebabkan berkurangnya output yang diproduksi. Dengan demikian, hal tersebut menyebabkan berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Tasyim, 2021) yang menjelaskan bahwa ekspektasi masyarakat di daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan inflasi yang tinggi serta meminta upah yang lebih tinggi menyebabkan di daerah tersebut akan kekurangan tenaga kerja dengan upah yang lebih murah karena tuntutan tenaga kerja yang menuntut upah yang lebih tinggi yang disebabkan seperti standar hidup yang lebih tinggi di daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi, hal tersebut menyebabkan Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sulawesi Utara.

b. Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil regresi menunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0886 $< \alpha$ 0,10 bahwa variabel Upah Minimum berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa dengan nilai koefisien sebesar 0.027111. Akan tetapi hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan upah minimum memiliki pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menjelaskan bahwa ketika adanya peningkatan upah minimum sebesar satu rupiah maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, begitupun sebaliknya ketika adanya penurunan upah minimum sebesar satu rupiah maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan semakin tingginya upah yang diberikan kepada pekerja maka akan menghasilkan kualitas dan produktivitas pada pekerja itu sendiri dan akan menguntungkan bagi perusahaan, dan penyerapan tenaga kerja juga akan semakin bertambah. Hasil dari penjelasan di atas, sependapat dengan penelitian (Hafiz, 2021) yang menunjukkan bahwa hubungan antara upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota Jawa Barat memiliki pengaruh hubungan positif dan signifikan.

c. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil regresi menunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.6678 $> \alpha$ 0,10 bahwa variabel Penanaman Modal Dalam Negeri tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien 0.000359. Hal ini menjelaskan bahwa dana pengalokasian pada variabel Penanaman Modal Dalam Negeri di Jawa Tengah hanya diberikan kepada sektor yang sifatnya teknologi dan bukan dari tenaga manusia berbasis modal atau padat karya (*capital intensive*), maka dari itu dari banyaknya yang menggunakan teknologi yang lebih praktis dan efisien menyebabkan kurangnya penyerapan tenaga kerja. Dengan berbagai kebijakan dan program harus terus ditingkatkan oleh pemerintah seperti memudahkan perizinan dalam melakukan penanaman

modal. Dari penjelasan diatas, sependapat dengan penelitian (Yasin, 2018) yang menunjukkan bahwa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur, yang disebabkan kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri masih banyak yang berupa non bangunan, dan cenderung bersifat *maintenance* mesin atau memperbaiki mesin lama tanpa menambah kapasitas produksi, akibat terlalu banyak penggunaan mesin, maka kurangnya penyerapan tenaga kerja.

d. Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil regresi menunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar $0.0010 < \alpha 0,05$ bahwa variabel Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien 0.005854. Ketika pembelian atau pengeluaran untuk membeli barang produksi, dapat menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian yang berasal dari investasi luar negeri yang berguna bagi kegiatan produktif. Hal tersebut dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan dapat menghasilkan pendapatan bertambah di suatu daerah, serta dapat pengetahuan baru dalam teknologi dari negara maju ke negara beekembang. Dengan demikian, bahwa Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Penjelasan diatas sependapat dengan penelitian (Agustini, 2017) yang menunjukkan bahwa variabel Penanaman Modal Asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan bahwa Penanaman Modal yang ditanamkan dalam perekonomian mampu memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta memperluas lapangan pekerjaan.

e. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil uji t menunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar $0.0398 < \alpha 0,05$ bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh

terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien sebesar 8208.207. Adanya pendidikan dan pelatihan sangat penting bagi masyarakat menjadi lebih berkualitas dalam pekerjaan, hal tersebut masyarakat dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Bukan hanya pendidikan dan pelatihan saja, menjaga kesehatan juga penting agar masyarakat bisa bekerja dengan baik. Dengan demikian, dengan mendapatkan kualitas pendidikan yang tinggi, standar hidup yang lebih baik, juga kesehatan yang baik dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan mendapatkan pekerjaan. Dengan tingginya Indeks Pembangunan Manusia akan menyebabkan juga banyaknya penyerapan tenaga kerja. Hasil penjelasan diatas sependapat dengan penelitian (Azzahra, 2023) yang menunjukkan hasil bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

4.8 Cross-Section Effect

Cross Section Effect menjelaskan perbedaan masing-masing individu berdasarkan intersep yang didapatkan.

Tabel 6 Cross Section Effect

Kabupaten/Kota	Effect	Kabupaten/Kota	Effect
Kabupaten Cilacap	280.766,1	Kabupaten Kudus	-56.667,31
Kabupaten Banyumas	309.036,8	Kabupaten Jepara	125.482,0
Kabupaten Purbalingga	-8.959.332	Kabupaten Demak	56.102,68
Kabupaten Banjarnegara	23.552,76	Kabupaten Semarang	74.423,22
Kabupaten Kebumen	116.249,5	Kab. Temanggung	-45.703,61
Kabupaten Purworejo	-122.905,5	Kabupaten Kendal	-27.060,86
Kabupaten Wonosobo	-45.782,46	Kabupaten Batang	-83.544,89
Kabupaten Magelang	237.935,8	Kabupaten Pekalongan	-30.192,57
Kabupaten Boyolali	32.447,50	Kabupaten Pemalang	152.189,4
Kabupaten Klaten	82.288,78	Kabupaten Tegal	173.337,6

Kabupaten Sukoharjo	-73.261,04	Kabupaten Brebes	372.481,7
Kabupaten Wonogiri	74.443,53	Kota Magelang	-486.976,5
Kabupaten Karanganyar	-55.717,87	Kota Surakarta	-309.878,5
Kabupaten Sragen	-38.400,04	Kota Salatiga	-484.480,1
Kabupaten Grobogan	246.853,7	Kota Semarang	297.476,3
Kabupaten Blora	3.105,515	Kota Pekalongan	-364.064,8
Kabupaten Rembang	-140.366,3	Kota Tegal	-398.832,3
Kabupaten Pati	149.899,6		

Dari nilai koefisien fixed effect yaitu sebesar -144142,9 dan seluruh nilai cross section effect menunjukkan nilai dibawah koefisien *fixed effect*. Hasil cross effect menunjukkan bahwa Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai tertinggi pada Kabupaten Brebes sebesar 372.481,7; Kabupaten Banyumas sebesar 309.036,8; Kota Semarang sebesar 297,476,3; Kabupaten Cilacap sebesar 280.766,1; Kabupaten Grobogan sebesar 246.853,7; dengan tingginya penyerapan tenaga kerja pada beberapa Kabupaten/Kota didorong oleh beberapa variabel yang ada pada penelitian ini seperti nilai Produk Domestik Regional Bruto yang relatif tinggi, Upah minimum yang relatif tinggi, Penanaman Modal Dalam Negeri yang relatif tinggi, Penanaman Modal Asing yang relatif tinggi atau Indeks Pembangunan Manusia yang relatif tinggi, Sedangkan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai terendah pada Kabupaten Purbalingga sebesar -8.959.323; Kota Magelang sebesar -486.976,5; Kota Salatiga sebesar -484.480,1; Kota Tegal sebesar 398.832,3; Kota Pekalongan sebesar -364.064,8; Kota Surakarta -309.832,3.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka hasil penelitian “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2022”. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2022.
2. Upah Minimum berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2022.
3. Penanaman Modal Dalam Negeri tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2022.
4. Penanaman Modal Asing berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2022.
5. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2022.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan penetapan upah minimum berperan sangat penting untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapat dibawah upah minimum dan melindungi para pekerja yang baru masuk kerja. Hubungan tingkat upah dengan tenaga kerja harus mencapai suatu ekuilibrium yang efisien. Pemerintah diharapkan membuat kebijakan pengupahan yang berkelanjutan agar dorongan kepada perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja bukan penawaran tenaga kerja yang nanti akan menyebabkan berkurangnya tenaga kerja. Dengan begitu, akan mempermudah regulasi bagi calon

pelamar kerja dengan adanya pengaturan upah dalam kesejahteraan para pekerja, serta pemerintah juga diharapkan memberikan pelatihan-pelatihan secara formal dan non-formal guna meningkatkan pengetahuan dan skill yang lebih baik dan merata.

2. Perkembangan Penanaman Modal Asing di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya dapat dikatakan sudah cukup baik, akan tetapi pemerintah diharapkan di setiap daerah membuat peraturan dan rencana secara matang agar untuk menjaga kestabilan dan keamanan ekonomi dan politik dalam negeri, memperbaiki infrastruktur yang mendorong perekonomian, meningkatkan profitabilitas dengan menggabungkan modal dengan tenaga kerja murah dalam upaya untuk mengurangi biaya produksi, serta mempermudah peraturan untuk penanaman modal dalam berinvestasi.
3. Komponen paling penting dalam Indeks Pembangunan Manusia ada 3 yaitu umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, serta standar hidup layak, pemerintah diharapkan mempertahankan dan meningkatkan hal tersebut dengan meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih penting melalui strategi dan kebijakan meliputi peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan primer, pengembangan produksi dan alat-alat kesehatan dalam negeri, peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk seluruh masyarakat, serta menyediakan calon tenaga kerja masa depan yang terampil dan professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arta, Y. K. (2013). Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 2, No. 2 .
- Azzahra, F., Mukhtar, S., & Iranto, D. (2023). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia tahun 2016-2022. *Sinomika Journal*, Vol. 2, No. 2 , 185-196.
- Badan Pusat Statistik (2023). <https://jateng.bps.go.id/indicator/26/83/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota.html>
- Badan Pusat Statistik (2023). <https://jateng.bps.go.id/indicator/157/1741/1/-seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- kemenkeu (2023). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/25TAHUN2007UU.HTM>
- Hafiz, E. A., & Haryatiningsih, R. (2021). Pengaruh PDRB, UMK, dan IPM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Jawa Barat 2010-2020. *Journal Riset Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, 55-65.
- Indradewa, I. G., & Natha, K. S. (2015, Agustus). Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 4, No. 8 , 923-950.
- Lube, F., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021, Oktober). Analisis Pengaruh Upah Minimum dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 21, No. 3 , 25-36.
- Mahendra, K. B., & Arka, S. (2019, Januari). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol.10, No.1, 60-89.
- Olivia, Y. S., & Widanta, A. A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali . *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* , Vol. 12, No. 06, 1186-1195.
- Paramita, R., & Christianingrum, R. (2017). Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Budget*, Vol. 2, No. 1 , 32-50.

- Permadi, E., & C, E. (2021, Juni). Analisa Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2018. *OECONOMICUS Journal Of Economics*, Vol. 5, No. 2, 86-95.
- Pratama, M. Y., Rahmi, D., & Amliah, I. (2022). Pengaruh Investasi, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, Vol. 2, No. 1, 108-116.
- Prayogo, I., & Hasmarini, M. I. (2022). Analisis Pengaruh IPM, Upah Minimum, PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Yogyakarta Tahun 2018-2021. *SEIKO : Journal of Management & Business*, Volume 5(Issue 2), 77 - 85.
- Putra, F. W., Ariani, N., & Nofrian, F. (2022). Analisis Relevansi Penanaman Modal Asing, Modal dalam Negeri dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia 1990 – 2019. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 3, No. 4, 708-719.
- Putri, N. A., & Soelistyo, A. (2018). Analisis Pengaruh Upah, PPDRB, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dikawasan Gerbangkertasusila Tahun 2012-2016 . *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 2 Jilid 3, 357-371.
- Rachman, A. (2022). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Di Provinsi Sulawesi Tenggara . *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, Volume 7, Nomor 2, 156-164.
- Ramdani, A. N., Supadi, & Kadarwati, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah 2014-2019. *Volume 2, Nomor 2* , 16-31.
- Romdhoni, A. H. (2017). Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, No. 02, 139-151.
- Sandika, R. S., Maulida, Y., & Setiawan, D. (2014, Oktober). Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Pelalawan. *JOM FEKON*, 1, NO. 2.
- Sulistiawati, R. (2012, Oktober). Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal EKSOS*, Volume 8, Nomor 3, 195 - 211.

- Susanti, E., & Indra. (2022, April). Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Berau 2005-2019. *Economy Bring Ultimate Informantion All About Development (ECO-BUILD) Journal*, Vol. 6, No. 1, 31-37.
- Susanto, B. S. (2014-2015). Penyerapan Tenaga Kerja Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Upah Minimum Di Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Management*, 21-32.
- Tasyim, D. A., Kawung, G. M., & Siwu, H. F. (2021, Juli). Pengaruh Jumlah Unit Usaha UMKM dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Vol.9 No.3, 391 - 400.
- Taufan, N. K., & Mafruhah, A. Y. (2022). Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Produk Domestik Regional Bruto dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat Tahun 2009-2021. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, Vol. 2 No. 2, 415-422.
- Wasilaputri, F. R. (2016). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Volume 5, Nomor 3, 243-250.
- Widagda, I. G., & Arka, S. (2019, Oktober). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Pada Provinsi Bali . *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* , Vol. 10, No 10, 4232 - 4260.
- Widyapangesti, D. I., & Soelistyo, A. (2022, Februari). Analisis Pengaruh PDRB, Investasi, Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, Vol. 6, No. 1, 123-133.
- Wildan. (2018). Pengaruh Investasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *EFFICIENT Indonesian Journal of Development Economics*, Vol 1 (3), 200-206.
- Yasin, M. (2018). Pengaruh Upah Minimum, Produ Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Investasi PMDN Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*, 1-82.
- Yektiningsih, E. (2018 , Desember). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. *Vol. 18, No. 2*.

LAMPIRAN

Data Variabel

Kabupaten/Kota	Tahun	TK	PDRB (miliar)	Upah Minimum	PMDN	PMA	IPM
Kabupaten							
Cilacap	2016	715.819	92.859	1.527.000	12.162.084,7	3.119,30	68,60
Cilacap	2017	788.414	95.255	1.636.890	395.274,4	5.839	68,90
Cilacap	2018	747.050	98.101	1.841.209	4.805.118,2	9.296,50	69,56
Cilacap	2019	788.073	100.327	1.989.058,08	6.830.889,7	16.668	69,98
Cilacap	2020	807.407	90.012	2.158.327	4.285.260,1	2.446	69,95
Cilacap	2021	747.329	91.945	2.228.904	1.554.233,1	3.159,60	70,42
Cilacap	2022	788.513	96.658	2.230.731	622.736,6	147.360,15	70,99
Banyumas	2016	693.340	33.051	1.350.000	119.899,6	917,6	70,49
Banyumas	2017	785.231	35.147	1.461.400	441.641,7	4.966	70,75
Banyumas	2018	835.296	37.415	1.589.000	614.635,3	773,5	71,30
Banyumas	2019	839.941	39.779	1.750.000	461.612,5	175,7	71,96
Banyumas	2020	824.866	39.122	1.900.000	1.075.029,7	203,2	71,98
Banyumas	2021	813.592	40.687	1.970.000	996.393,80	4.436	72,44

Banyumas	2022	817.989	43.070	1.983.261	859.956	11.452,73	73,17
Purbalingga	2016	430.097	14.816	1.377.500	19781,7	1620,8	67,48
Purbalingga	2017	463.809	15.612	1.522.500	45765,3	363030	67,72
Purbalingga	2018	462.740	16.459	1.655.200	9103,8	12358,2	68,41
Purbalingga	2019	458.799	17.388	1.788.500	52876,3	204,8	68,99
Purbalingga	2020	469.748	17.183	1.940.800	137433,3	538,2	68,97
Purbalingga	2021	473.232	17.731	1.988.000	569.164	17420,3	69,15
Purbalingga	2022	510.319	18.691	1.996.814	264.394,4	313.721,18	69,54
Banjarnegara	2016	464.044	12.933	1.265.000	20.224,9	2.000	65,52
Banjarnegara	2017	464.432	13.663	1.370.000	50.645,3	1.107	65,86
Banjarnegara	2018	482.388	14.438	1.490.000	148.609,1	23,1	66,54
Banjarnegara	2019	471.811	15.247	1.610.000	168.026,9	71	67,34
Banjarnegara	2020	466.173	15.046	1.748.000	68.582,9	66,6	67,45
Banjarnegara	2021	470.460	15.536	1.805.000	114.381,1	1.004,2	67,86
Banjarnegara	2022	487.714	16.359	1.819.835	495.261,1	43.550,83	68,81
Kebumen	2016	590.568	16.924	1.324.600	41.408,9	0	67,41
Kebumen	2017	560.548	17.795	1.433.900	17.065	0	68,29
Kebumen	2018	558.741	18.778	1.560.000	71.422,6	0	68,80

Kebumen	2019	592.558	19.815	1.686.000	78.430,3	0	69,60
Kebumen	2020	595.203	19.528	1.835.000	39.135,2	0	69,81
Kebumen	2021	582.719	20.253	1.895.000	106.714,6	0	70,05
Kebumen	2022	619.368	21.426	1.911.850	135.572,3	0	70,79
Purworejo	2016	359.040	11.422	1.300.000	0	0	70,66
Purworejo	2017	342.433	12.024	1.445.000	13.941,7	790	71,31
Purworejo	2018	356.210	12.665	1.573.000	113.205	0	71,87
Purworejo	2019	363.608	13.353	1.700.000	18.337,1	15	72,50
Purworejo	2020	378.951	13.138	1.845.000	71.488,9	45,6	72,68
Purworejo	2021	400.401	13.573	1.905.400	44.815,3	106,6	72,98
Purworejo	2022	393.775	14.301	1.906.781	67.572	3.667,86	73,60
Wonosobo	2016	409.389	11.941	1.326.000	0	0	66,19
Wonosobo	2017	404.533	12.436	1.457.100	1.688,5	793	66,89
Wonosobo	2018	413.837	13.066	1.585.000	16.125,3	1,5	67,81
Wonosobo	2019	415.203	13.793	1.712.500	14.715	0,3	68,27
Wonosobo	2020	405.187	13.566	1.859.000	9.280,4	0,5	68,22
Wonosobo	2021	405.526	14.065	1.920.000	226.642,1	106,6	68,43
Wonosobo	2022	431.010	14.771	1.931.285	92.517,5	59.889,72	68,89

Magelang	2016	623.713	19.882	1.410.000	30.638,4	261,3	67,85
Magelang	2017	704.651	20.975	1.570.000	1850.31,7	2.493	68,39
Magelang	2018	685.452	22.083	1.742.000	125.480,3	2.733	69,11
Magelang	2019	723.889	23.253	1.882.000	193.883,8	43,6	69,87
Magelang	2020	741.284	22.865	2.042.200	197.252,5	62,9	69,87
Magelang	2021	735.613	23.662	2.075.000	309.145	256,1	70,12
Magelang	2022	781.195	24.953	2.081.807	892.603,6	10.514,24	70,85
Boyolali	2016	537.179	19.139	1.403.500	1.024.111,6	18.538,1	72,18
Boyolali	2017	504.648	20.249	1.519.289	474.463,2	13.194	72,64
Boyolali	2018	537.392	21.406	1.651.650	11.113.601,2	15.263,2	73,22
Boyolali	2019	539.778	22.681	1.790.000	422.073,6	8.209,3	73,80
Boyolali	2020	549.582	22.410	1.942.500	709.545	5.192,3	74,25
Boyolali	2021	559.932	23.447	2.000.000	1.047.750,5	25.795,8	74,40
Boyolali	2022	562.948	24.931	2.010.299	1.518.219,5	780.253,98	74,97
Klaten	2016	596.418	23.726	1.400.000	62.385,3	6.372,7	73,97
Klaten	2017	586.684	24.993	1.528.500	247.327,2	1.0257	74,25
Klaten	2018	602.911	26.361	1.661.632,35	229.788,5	3.091,4	74,79
Klaten	2019	621.855	27.806	1.795.061,43	212.273,4	3.212,2	75,29

Klaten	2020	606.253	27.480	1.947.821,16	43.751,7	2.204,4	75,56
Klaten	2021	596.661	28.531	2.011.515	110.407,8	23.690,2	76,12
Klaten	2022	623.116	30.215	2.015.623	1.081.215,8	411.713,03	76,95
Sukoharjo	2016	428.885	22.436	1.396.000	234.782,2	160.729	75,06
Sukoharjo	2017	450.280	24.164	1.513.000	2.055.377,8	26.009	75,56
Sukoharjo	2018	463.512	25.564	1.648.000	1.107.151,3	5.3681,8	76,07
Sukoharjo	2019	465.395	27.076	1.783.500	921.677,9	4.861	76,84
Sukoharjo	2020	454.419	26.616	1.938.000	439.117,3	5.452,7	76,98
Sukoharjo	2021	176.867	27.634	1.986.450	861.519,3	2.300,2	77,13
Sukoharjo	2022	475.594	29.185	1.998.153	167.093,1	232.263,38	77,94
Wonogiri	2016	505.043	17.869	1.293.000	222.707,4	6.063,4	68,23
Wonogiri	2017	531.570	18.819	1.401.000	41.831,9	6.553	68,66
Wonogiri	2018	567.194	19.837	1.542.000	42.569,2	121,7	69,37
Wonogiri	2019	528.362	20.856	1.655.000	58.524,9	1.101,8	69,98
Wonogiri	2020	557.865	20.563	1.797.000	41.716,5	5.272,3	70,25
Wonogiri	2021	559.093	21.251	1.827.000	341.596,2	4.122,4	70,49
Wonogiri	2022	578.089	22.448	1.839.043	20.7345,8	89.886,99	71,04
Karanganyar	2016	449.689	22.436	1.420.000	1.875.248,6	3.478,9	74,90

Karanganyar	2017	457.277	23.732	1.420.000	1.957.677,3	930	75,22
Karanganyar	2018	471.327	25.150	1.696.000	989.035,4	7.522,3	75,54
Karanganyar	2019	470.938	26.600	1.833.000	261.021,8	13.751,8	75,89
Karanganyar	2020	484.423	26.103	1.989.000	181.965,3	9.964,2	75,86
Karanganyar	2021	487.270	27.034	2.054.040	936.568,3	298.486,2	75,99
Karanganyar	2022	476.875	28.620	2.064.313	898..890,9	222.163,86	76,58
Sragen	2016	464.899	22.626	1.300.000	965.145,6	3.051,5	71,43
Sragen	2017	466.610	23.977	1.422.585,52	999.424,6	1.630	72,40
Sragen	2018	444.963	25.356	1.546.492,72	2.441.479	5.105,9	72,96
Sragen	2019	458.123	26.853	1.637.500	33.837,4	1.759,2	73,43
Sragen	2020	458.856	26.367	1.815.914,85	117.734,8	5.916,3	73,95
Sragen	2021	483.592	27.355	1.829.000	617.771,9	3.159,6	74,08
Sragen	2022	470.456	28.930	1.839.429	773.266,5	71.068,36	74,65
Grobogan	2016	685.333	16.683	1.305.000	28.717	7.731,6	68,52
Grobogan	2017	724.515	17.659	1.435.000	247.327,2	19.129	68,87
Grobogan	2018	727.216	18.689	1.560.000	215.708,8	42.752,3	69,32
Grobogan	2019	707.352	19.693	1.685.500	393.135,8	20.613,8	69,86
Grobogan	2020	710.909	109.383	1.830.000	3.492.706,6	14.574,7	69,87

Grobogan	2021	748.718	20.116	1.890.000	413.7736	16.537,2	70,41
Grobogan	2022	744.832	21.318	1.894.032	517.607,1	253.927,58	70,97
Blora	2016	443.275	15.915	1.328.500	0	14,8	66,61
Blora	2017	455.270	16.867	1.438.100	10.0356	6.342	67,52
Blora	2018	476.870	17.605	1.564.000	13.246,2	4.234,9	67,95
Blora	2019	448.354	18.318	1.690.000	2.561,8	207	68.65
Blora	2020	468.013	17.484	1.834.000	282.232,4	133,3	68,84
Blora	2021	467.018	18.126	1.894.000	75.106,9	64,8	69,37
Blora	2022	500.373	18.612	1.904.196	74.495,7	347,27	69,95
Rembang	2016	306.110	11.423	1.300.000	155.0501	741,6	68,60
Rembang	2017	335.518	12.220	1.408.000	74.039	4.518	68,95
Rembang	2018	327.357	12.940	1.535.000	427.814,8	16.643,3	69,46
Rembang	2019	321.091	13.612	1.660.000	242.943,5	8.678,7	70,15
Rembang	2020	314.797	13.410	1.802.000	237.572,5	497,8	70,02
Rembang	2021	348.727	13.926	1.861.000	154.593,7	26.876,7	70,43
Rembang	2022	375.614	14.699	1.874.322	765.401,9	191.360,11	71
Pati	2016	617.299	26.130	1.310.000	1.254.316,9	5.407,2	69,03
Pati	2017	623.407	27.612	1.420.500	889.755,5	3.978	70,12

Pati	2018	633.341	29.190	1.585.000	106.167,7	163,6	70,71
Pati	2019	631.250	30.885	1.742.000	221.462,4	6.053,3	71,35
Pati	2020	607.706	30.527	1.891.000	176.431,6	12.870,5	71,77
Pati	2021	662.492	31.559	1.953.000	222.494,1	45.944,3	72,28
Pati	2022	692.477	33.312	1.968.339	188.886,3	1.459.912,82	73,14
Kudus	2016	428.500	66.680	1.608.200	88.1543,3	0	72,94
Kudus	2017	453.121	68.821	1.740.900	1.034.981,2	2.461	73,84
Kudus	2018	468.131	71.049	1.892.500	687.187,7	114	74,58
Kudus	2019	470.169	73.242	2.044.467,75	2.041.677,3	849	74,94
Kudus	2020	483.983	70.965	2.218.451,95	1.919.450,4	1.913,5	75
Kudus	2021	501.443	69.872	2.290.095	720.573,1	797,1	75,16
Kudus	2022	485.048	71.433	2.293.058	583.677	108.041,11	75,89
Jepara	2016	583.388	18.081	1.350.000	21.992,3	124.256,1	70,25
Jepara	2017	609.391	19.055	1.600.000	5.6968	1.042.726	70,79
Jepara	2018	624.774	20.170	1.739.360	8.365,1	915.787,3	71,38
Jepara	2019	635.258	21.384	1.879.031	17.620,7	1.434.375,3	71,88
Jepara	2020	634.386	20.973	2.040.000	34.311,7	370.928,7	71,99
Jepara	2021	658.208	21.944	2.107.000	149.830,7	377.464	72,36

Jepara	2022	671.473	23.250	2.108.403	160.736,9	9.424.589,6	73,15
Demak	2016	534.301	15.672	1.745.000	1.003.806,8	17.738,3	70,10
Demak	2017	549.295	16.584	1.900.000	758.548,7	15.784	70,41
Demak	2018	571.560	17.480	2.065.490	463.882,8	21.462	71,26
Demak	2019	561.895	18.417	2.240.000	517.438,8	8.655,6	71,87
Demak	2020	574.602	18.375	2.432.000	962.320,9	14.603,9	72,22
Demak	2021	574.602	18.856	2.511.526	2.569.159,4	3.864	72,57
Demak	2022	571.566	19.846	2.513.005	2.495.472,8	602.150,67	73,36
Semarang	2016	564.211	30.292	1.610.000	222.324,6	28.988	72,40
Semarang	2017	596.297	32.003	1.745.000	1.339.475,7	24.727	73,20
Semarang	2018	575.925	33.818	1.900.000	2.141.898,6	1.8850,2	73,61
Semarang	2019	600.787	35.639	2.055.000	545.448,3	23.384,2	74,14
Semarang	2020	600.322	34.688	2.229.880,5	575.108,6	3.845,7	74,10
Semarang	2021	598.413	35.949	2.302.798	633.558,7	3.314,4	74,24
Semarang	2022	619.227	37.858	2.311.254	1.156.629,6	1.937.912,7	74,67
Temanggung	2016	423.256	13.116	1.313.000	52.096,5	6.406,8	67,40
Temanggung	2017	421.481	13.776	1.431.500	165.803,8	0	68,34
Temanggung	2018	426.394	14.483	1.557.000	93.391	9.093,4	68,83

Temanggung	2019	444.788	15.214	1.682.027,1	7.581,9	195,7	69,56
Temanggung	2020	343.400	14.891	1.825.200	33.142	394,2	69,57
Temanggung	2021	443.009	15.388	1.885.000	94.001,4	67.008,6	69,88
Temanggung	2022	460.765	16.187	1.887.832	141.770,7	338.482,07	70,77
Kendal	2016	435.045	26.139	1.639.600	0	50.722,1	70,11
Kendal	2017	460.967	27.650	1.774.867	4.566,1	6.998	70,62
Kendal	2018	462.260	29.246	1.929.458	311.708,4	60.484,9	71,28
Kendal	2019	476.852	30.916	2.084.393,48	135.930,5	18.726,6	71,97
Kendal	2020	493.062	30.449	2.261.775	201.109,1	65.813	72,29
Kendal	2021	493.732	31.632	2.335.735	560.723	222.588,3	72,50
Kendal	2022	524.396	33.341	2.340.312	585.981,4	4.609.592,78	73,19
Batang	2016	361.065	12.948	1.467.500	0	411.211	66,38
Batang	2017	365.710	13.667	1.603.000	321.422,8	431.383	67,35
Batang	2018	393.192	14.449	1.749.900	544.148,6	1.009.895,1	67,86
Batang	2019	389.319	15.227	1.900.000	240.595,5	964.463,2	68,42
Batang	2020	387.741	15.031	2.061.700	253.422,5	613.150	68,65
Batang	2021	402.320	15.764	2.129.117	3.202.162	298.486,2	68,92
Batang	2022	426.004	16.705	2.135.535	1.142.111,1	4.736.710,83	69,45

Pekalongan	2016	390.027	13.922	1.463.000	1.373.602,7	7,4	67,71
Pekalongan	2017	441.290	14.679	1.583.697,5	5.907.349,9	0	68,40
Pekalongan	2018	447.271	15.525	1.721.637,55	1.241.009,1	0	68,97
Pekalongan	2019	454.776	16.356	1.859.885,05	40.784,4	0	69,71
Pekalongan	2020	446.922	16.048	2.018.161,27	76.392,8	0	69,63
Pekalongan	2021	465.460	16.615	2.084.155	478.072,6	23.627,6	70,11
Pekalongan	2022	467.510	17.463	2.094.646	202.730,7	2.439,5	70,81
Pemalang	2016	553.935	15.470	1.325.000	252.734,1	1.496,8	64,17
Pemalang	2017	587.819	16.337	1.460.000	2.033,3	1.144	65,04
Pemalang	2018	589.715	17.266	1.588.000	103.357,8	1.152,1	65,67
Pemalang	2019	600.325	18.267	1.718.000	51.606,5	2.237,2	66,32
Pemalang	2020	589.786	18.156	1.865.000	110.094,8	1.039,2	66,32
Pemalang	2021	601.815	18.933	1.926.000	175.273,7	67.008,6	66,56
Pemalang	2022	642.038	19.895	1.940.890	63.0479,4	297.689,25	67,19
Tegal	2016	569.566	21.183	1.373.000	93.152,2	2.239,4	65,84
Tegal	2017	645.162	22.322	1.487.000	40.4467,7	10.5411	66,44
Tegal	2018	637.974	23.553	1.617.000	59.570,2	13.391,8	67,33
Tegal	2019	653.366	24.861	1.747.000	40.784,4	13.582,3	68,24

Tegal	2020	644.978	24.493	1.896.000	7.577.239,2	9.702,7	68,39
Tegal	2021	644.499	25.401	1.958.000	157.467,2	60.546,3	68,79
Tegal	2022	643.030	26.707	1.968.446	565.738,4	935.645,69	69,53
Brebes	2016	767.841	27.931	1.310.000	0	18.133,2	63,98
Brebes	2017	823.661	29.509	1.418.100	62.908,2	26.416	64,86
Brebes	2018	840.343	31.060	1.542.000	67.550,8	91.202,5	65,68
Brebes	2019	830.601	32.848	1.665.850	44.044,3	29.764,3	66,12
Brebes	2020	821.061	32.693	1.807.614	34.026,1	90.895,4	66,11
Brebes	2021	793.289	33.533	1.866.723	514.789,8	33.631,5	66,32
Brebes	2022	826.023	35.415	1.885.019	266.600,2	1.370.810,93	67,03
Kota							
Magelang	2016	57.133	5.522	1.341.000	13.740	57,3	77,16
Magelang	2017	58.582	5.821	1.453.000	16.418.900	8.009	77,84
Magelang	2018	63.698	6.139	1.580.000	12.966,2	58,2	78,31
Magelang	2019	60.649	6.471	1.707.000	25.080,3	692,5	78,80
Magelang	2020	60.612	6.312	1.853.000	30.106,3	1.198,8	78,99
Magelang	2021	60.317	6.514	1.914.000	289.066,1	117,3	79,43
Magelang	2022	62.347	6.889	1.935.913	116.714,9	4.381,06	80,39

Surakarta	2016	271.199	29.976	1.418.000	11.657,5	10.949,9	80,76
Surakarta	2017	259.394	31.685	1.534.985	29.262,3	3.329	80,85
Surakarta	2018	262.190	33.506	1.668.700	383.298,8	89,4	81,46
Surakarta	2019	277.230	35.441	1.802.700	212.674,8	632,9	81,86
Surakarta	2020	266.082	34.816	1.956.200	391.912,5	2.282,3	81,21
Surakarta	2021	260.025	36.211	2.013.810	153.236,4	1.651,2	82,62
Surakarta	2022	271.928	38.476	2.035.720	450.421,7	85.191,65	83,08
Salatiga	2016	84.380	8.168	1.450.953	4.149,8	36.709,3	81,14
Salatiga	2017	100.834	8.624	1.596.844,87	98.595,9	31.822	81,68
Salatiga	2018	105.114	9.128	1.735.930,06	121.931,2	9.679,3	82,41
Salatiga	2019	99.041	9.666	1.875.325,24	22.520,3	15.501,8	83,12
Salatiga	2020	102.053	9.504	2.034.915,42	91.667,3	11.566,7	83,14
Salatiga	2021	103.979	9.822	2.101.457	92.592,4	83.630,9	83,60
Salatiga	2022	108.396	10.365	2.128.523	101.195,1	289.110,88	84,35
Semarang	2016	836.837	115.543	1.909.000	501.740,8	101.726,9	81,19
Semarang	2017	899.796	123.280	2.125.000	1.129.039,2	200.588	82,01
Semarang	2018	883.396	131.266	2.310.087,5	8.534.747,9	46.011,6	82,72
Semarang	2019	919.003	140.200	2.498.587,53	4.048.092,1	122.124	83,19

Semarang	2020	925.963	137.602	2.715.000	6.633.894,6	110.751,5	83,05
Semarang	2021	936.076	144.705	2.810.025	8.483.055,5	104.259	83,55
Semarang	2022	994.091	152.999	2.835.021	5.096.829,9	4.777.159,22	84,08
Pekalongan	2016	143.376	6.367	1.500.000	15.620,5	0	73,32
Pekalongan	2017	149.487	6.706	1.623.750	51.256,5	0	73,77
Pekalongan	2018	152.977	7.088	1.765.178,63	96.123	597	74,24
Pekalongan	2019	159.758	7.477	1.906.922,47	24.335,2	9,1	74,77
Pekalongan	2020	146.219	7.338	2.072.000	26.998,6	70,6	74,98
Pekalongan	2021	168.725	7.601	2.139.754	410.594,8	531,7	75,40
Pekalongan	2022	161.470	8.039	2.156.213	69.178,4	32.346,34	75,90
Tegal	2016	110.942	9.445	1.385.000	10.237,7	105,6	73,55
Tegal	2017	114.521	10.007	1.499.500	34.326,6	164	73,95
Tegal	2018	115.158	10.594	1.630.500	13.494,7	1.068,3	74,44
Tegal	2019	122.720	11.206	1.762.000	34.483,8	2.345	74,93
Tegal	2020	114.121	10.949	1.925.000	47.697,1	37,3	75,07
Tegal	2021	121.510	11.290	1.982.750	199.990,3	962,6	75,52
Tegal	2022	124.887	11.873	2.005.930	101.932,3	39.950	76,15

COMMON EFFECT MODEL

Dependent Variable: TK
Method: Panel Least Squares
Date: 03/04/24 Time: 13:13
Sample: 2016 2022
Periods included: 7
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2051205.	134321.7	15.27083	0.0000
IPM	-25643.96	2006.116	-12.78289	0.0000
PDRB	5637.662	401.0688	14.05660	0.0000
PMA	0.015335	0.010212	1.501652	0.1345
PMDN	-0.007356	0.005124	-1.435719	0.1524
UPAH	0.080885	0.033449	2.418144	0.0163
Root MSE	124760.4	R-squared	0.610650	
Mean dependent var	499599.0	Adjusted R-squared	0.602505	
S.D. dependent var	200352.5	S.E. of regression	126316.7	
Akaike info criterion	26.35516	Sum squared resid	3.81E+12	
Schwarz criterion	26.44090	Log likelihood	-3222.507	
Hannan-Quinn criter.	26.38969	F-statistic	74.96874	
Durbin-Watson stat	0.226416	Prob(F-statistic)	0.000000	

FIXED EFFECT MODEL

Dependent Variable: TK
Method: Panel Least Squares
Date: 02/27/24 Time: 13:38
Sample: 2016 2022
Periods included: 7
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-144143.1	260064.2	-0.554260	0.5800
PDRB	64.97738	219.0508	0.296631	0.7670
UPAH	0.027111	0.015845	1.710999	0.0886
PMDN	0.000359	0.000835	0.429735	0.6678
PMA	0.005854	0.001751	3.343625	0.0010
IPM	8208.210	3966.276	2.069501	0.0398

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	17157.43	R-squared	0.992636
Mean dependent var	499599.0	Adjusted R-squared	0.991236
S.D. dependent var	200352.5	S.E. of regression	18756.78
Akaike info criterion	22.66478	Sum squared resid	7.21E+10
Schwarz criterion	23.23641	Log likelihood	-2736.436
Hannan-Quinn criter.	22.89498	F-statistic	708.5794
Durbin-Watson stat	1.817060	Prob(F-statistic)	0.000000

RANDOM EFFECT MODEL

Dependent Variable: TK

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/04/24 Time: 13:10

Sample: 2016 2022

Periods included: 7

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 245

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	527733.5	207076.6	2.548495	0.0114
IPM	-2104.043	3142.534	-0.669537	0.5038
PDRB	274.4390	212.5471	1.291191	0.1979
PMA	0.006632	0.001736	3.819869	0.0002
PMDN	0.000288	0.000835	0.345100	0.7303
UPAH	0.063925	0.012985	4.923162	0.0000

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	126522.8	0.9785
Idiosyncratic random	18756.78	0.0215

Weighted Statistics

Root MSE	20427.62	R-squared	0.369969
Mean dependent var	27949.97	Adjusted R-squared	0.356788
S.D. dependent var	25788.43	S.E. of regression	20682.44
Sum squared resid	1.02E+11	F-statistic	28.06924
Durbin-Watson stat	1.372639	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics

R-squared	0.103726	Mean dependent var	499599.0
Sum squared resid	8.78E+12	Durbin-Watson stat	0.015986

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	312.774673	(34,205)	0.0000
Cross-section Chi-square	972.142190	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: TK

Method: Panel Least Squares

Date: 12/29/23 Time: 21:25

Sample: 2016 2022

Periods included: 7

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2051208.	134321.7	15.27086	0.0000
IPM	-25643.99	2006.115	-12.78291	0.0000
PDRB	0.005638	0.000401	14.05661	0.0000
PMA	0.015335	0.010212	1.501645	0.1345
PMDN	-0.007356	0.005124	-1.435707	0.1524
UPAH	0.080884	0.033449	2.418128	0.0163
Root MSE	124760.4	R-squared		0.610650
Mean dependent var	499599.0	Adjusted R-squared		0.602505
S.D. dependent var	200352.5	S.E. of regression		126316.7
Akaike info criterion	26.35516	Sum squared resid		3.81E+12
Schwarz criterion	26.44090	Log likelihood		-3222.507
Hannan-Quinn criter.	26.38969	F-statistic		74.96881
Durbin-Watson stat	0.226418	Prob(F-statistic)		0.000000

UJI LAGRANGE MULTIPLIER

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	580.2183 (0.0000)	1.952199 (0.1624)	582.1705 (0.0000)
Honda	24.08772 (0.0000)	-1.397211 (0.9188)	16.04461 (0.0000)
King-Wu	24.08772 (0.0000)	-1.397211 (0.9188)	8.040969 (0.0000)
Standardized Honda	25.36182 (0.0000)	-1.087718 (0.8616)	13.60728 (0.0000)
Standardized King-Wu	25.36182 (0.0000)	-1.087718 (0.8616)	6.005461 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	580.2183 (0.0000)

UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	56.592933	5	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
IPM	8208.206...	-2104.066011	5855812.2...	0.0000
PDRB	0.000065	0.000274	0.000000	0.0001
PMA	0.005854	0.006832	0.000000	0.0006
PMDN	0.000359	0.000288	0.000000	0.0020
UPAH	0.027111	0.063925	0.000082	0.0001

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: TK

Method: Panel Least Squares

Date: 12/29/23 Time: 20:59

Sample: 2016 2022

Periods included: 7

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-144142.9	260064.0	-0.554259	0.5800
IPM	8208.207	3966.274	2.069501	0.0398
PDRB	6.50E-05	0.000219	0.296645	0.7670
PMA	0.005854	0.001751	3.343624	0.0010
PMDN	0.000359	0.000835	0.429733	0.6678
UPAH	0.027111	0.015845	1.711000	0.0886

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	17157.43	R-squared	0.992636
Mean dependent var	499599.0	Adjusted R-squared	0.991236
S.D. dependent var	200352.5	S.E. of regression	18756.78
Akaike info criterion	22.86478	Sum squared resid	7.21E+10
Schwarz criterion	23.23641	Log likelihood	-2736.436
Hannan-Quinn criter.	22.89498	F-statistic	708.5794
Durbin-Watson stat	1.817061	Prob(F-statistic)	0.000000

CROSS-SECTION FIXED EFFECT

KABUPATEN_KOTA	Effect
Kabupaten Cilacap	280766.1
Kabupaten Banyumas	309036.8
Kabupaten Purbalingga	-89.59332
Kabupaten Banjarnegara	23552.76
Kabupaten Kebumen	116249.5
Kabupaten Purworejo	-122905.5
Kabupaten Wonosobo	-45782.46
Kabupaten Magelang	237935.8
Kabupaten Boyolali	32447.50
Kabupaten Klaten	82288.78
Kabupaten Sukoharjo	-73261.04
Kabupaten Wonogiri	74443.53
Kabupaten Karanganyar	-55717.87
Kabupaten Sragen	-38400.04
Kabupaten Grobogan	246853.7
Kabupaten Blora	3105.515
Kabupaten Rembang	-140366.3
Kabupaten Pati	149899.6
Kabupaten Kudus	-56667.31
Kabupaten Jepara	125482.0
Kabupaten Demak	56102.68
Kabupaten Semarang	74423.22
Kabupaten Temanggung	-45703.61
Kabupaten Kendal	-27060.86
Kabupaten Batang	-83544.89
Kabupaten Pekalongan	-30192.57
Kabupaten Pemalang	152189.4
Kabupaten Tegal	173337.6
Kabupaten Brebes	372481.7
Kota Magelang	-488976.5
Kota Surakarta	-309878.5
Kota Salatiga	-484480.1
Kota Semarang	297476.3
Kota Pekalongan	-364064.8
Kota Tegal	-398832.3